



**IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM
MENUNJANG PERWUJUDAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
LAPORAN KEUANGAN DESA WRINGINREJO KECAMATAN
GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Pada
Minat Studi Akuntansi Program Studi Akuntansi

Diajukan Oleh:

ARNI TIA NINGRUM

NIM: 20105086

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA
JEMBER
2024**



**IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM
MENUNJANG PERWUJUDAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
LAPORAN KEUANGAN DESA WRINGINREJO KECAMATAN
GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Pada
Minat Studi Akuntansi Program Studi Akuntansi

Diajukan Oleh:

ARNI TIA NINGRUM

NIM: 20105086

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA
JEMBER
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

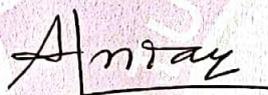
**“IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM
MENUNJANG PERWUJUDAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
LAPORAN KEUANGAN DESA WRINGINREJO KECAMATAN
GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI”**

NAMA : ARNI TIA NINGRUM
NIM : 20105086
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
MATA KULIAH DASAR : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

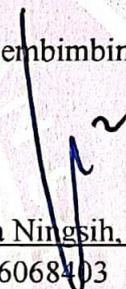
Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Asisten



Dr. Yunionita Indah Handayani, S.E., MBA
NIDN. 0012056702



Wiwik Fitria Ningsih, S.E., M.Akun
NIDN. 0726068403

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Institut Teknologi dan Sains Mandala

Kaprodi Akuntansi FEB

Institut Teknologi dan Sains Mandala



Drs. Muhammad Firdaus, S.p., M.M., M.P
NIDN. 0008077101



Nurshabrina Kartika Sari, S.E., M.M
NIDN. 0714088901

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

**IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM
MENUNJANG PERWUJUDAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
LAPORAN KEUANGAN DESA WRINGINREJO KECAMATAN
GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI**

Telah dipertahankan tim penguji skripsi pada:

Hari/Tanggal : Senin 24 Juni 2024

Jam : 08.00 – 09.30

Tempat : Ruang Sidang ITS Mandala

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi:

Dr. Agustin H.P.,M.M

Ketua Penguji

Wiwik Fitria Ningsih, S.E., M.Akun

Sekretaris Penguji

Dr. Yuniorita Indah Handayani, S.E., MBA

Anggota Penguji



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Institut Teknologi dan Sains Mandala



Drs. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P
NIDN. 0008077101

Kaprodi Akuntansi FEB

Institut Teknologi dan Sains Mandala



Nurshandrina Kartika Sari, S.E., M.M
NIDN. 0714088901

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arni Tia Ningrum

Nim : 20105086

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Dasar : Akuntansi Sektor Publik

Judul Tugas Akhir : **IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENUNJANG PERWUJUDAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA WRINGINREJO KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari Skripsi ini terbukti hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya siap menanggung risiko dibatalkannya karya ilmiah yang telah saya buat sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 25 Mei 2024



Arni Tia Ningrum

MOTTO

وإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"

(QS. Ibrahim:7)

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عِبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي

“Aku tergantung persangkaan hamba kepada-Ku. Aku bersamanya kalau dia mengingat-Ku. Kalau dia mengingatkmu pada dirinya, maka Aku mengingatnya pada diri-Ku.”

(HR Bukhari, No. 7405 dan Muslim, No. 2675)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT dan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW atas segala rahmat dan karunianya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana S1 Akuntansi pada Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari kesalahan. Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan anugerah dan berkah yang melimpah dalam menjalankan proses dan tanggung jawab penulis sebagai mahasiswi Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember.
2. Bapak Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P selaku Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala.
3. Bapak Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Sains Mandala.
4. Ibu Nurshadrina Kartika Sari, S.E., M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Sains Mandala.
5. Ibu Dr. Yuniorita Indah Handayani, S.E., MBA selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan dan pengarahan sehingga penyusunan skripsi terlaksana dengan baik.

6. Ibu Wiwik Fitria Ningsih, S.E., M.Akun selaku Dosen Pembimbing Asisten yang telah meluangkan waktu untuk meberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penyusunan skripsi terlaksana dengan baik.
7. LLDIKTI yang telah memberikan kesempatan bagi anak bangsa yang kurang mampu dan mempunyai kemauan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan.
8. Kepala Desa Wringinrejo dan seluruh jajaran perangkatnya serta masyarakat yang telah membantu saya dalam pengerjaan skripsi penulis.
9. Kedua orang tua, terutama kepada almarhumah “Ibu Mu’awannah” yang selalu memberikan kasih sayang yang tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun dan menjadi motivasi serta alasan penulis untuk terus menjadi orang yang sabar dan pantang menyerah. Dan kepada “Bapak Sauni” yang selalu mendukung semua kegiatan penulis dalam segala hal baik apapun dan yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan serta semangat yang tiada hentinya.
10. Paman Syaiful dan Bibi Khasanah yang selalu mendukung semua kegiatan penulis baik dalam segi finansial serta doa-doa baiknya.
11. Seluruh Dosen dan Guru yang telah berjasa begitu besar dalam mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan penulis.

12. Sahabat sekaligus saudara Eva, Andini, Sherly, Adiba, Nata dan Melfin yang selalu memberi dukungan, semangat dan saling menguatkan dalam suka maupun duka dan menjadi peran penting dalam kehidupan penulis, karena belajar banyak hal baik dari kalian semua.

13. Lilis Handayani teman dari SMA yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, yang menjadi tempat berkeluh kesah terbaik apapun masalah yang penulis hadapi.

14. Seluruh mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2020 yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember.

15. Dan kepada semua pihak yang belum penulis sebutkan, terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, dan doa-doa baiknya kepada penulis.

Penulis menyadari adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena itu penulis menerima kritik, saran dan masukan dari pembaca sehingga penulis dapat lebih baik di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Jember, 25 Mei 2024

Penulis,

Arni Tia Ningrum

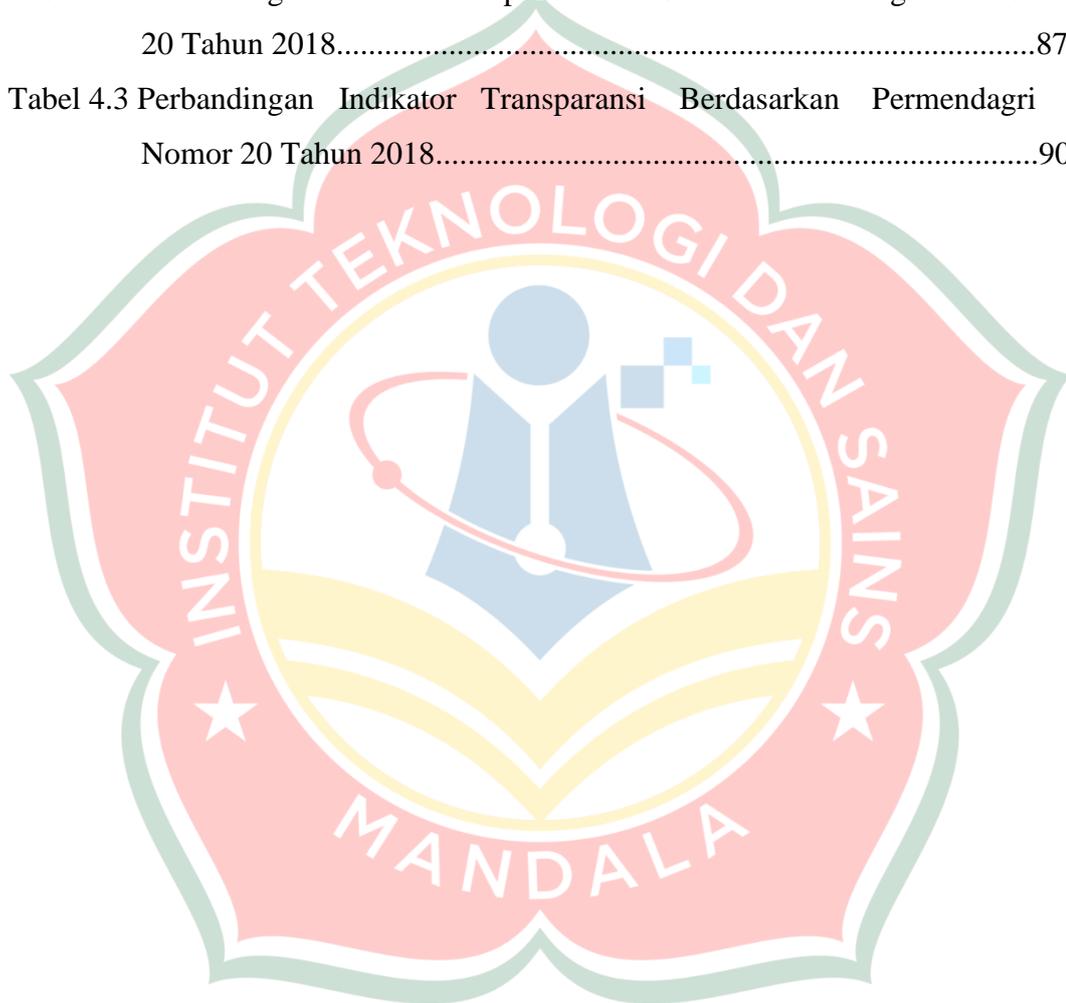
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Penelitian terdahulu	7
1.6 Tinjauan Pustaka.....	17
1.6.1 <i>Good Village Governance</i>	17
1.6.2 Pengelolaan Keuangan Desa.....	20
1.6.3 Akuntabilitas	25
1.6.4 Transparansi	27
1.6.5 Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).....	27
1.6.6 Laporan Keuangan Desa	29
1.7 Batasan Masalah	30
BAB II METODE PENELITIAN.....	25
2.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian.....	25
2.2 Teknik Pengambilan Sampel	32
2.3 Metode Pengumpulan Data.....	33
2.4 Tahapan Penelitian.....	37
2.5 Pendekatan Dalam Analisis Data.....	39
2.6 Keabsahan Penelitian	42
BAB III HASIL PENELITIAN	44
3.1 Orientasi Kancha Penelitian.....	44
3.1.1 Gambaran Umum Desa Wringinrejo	44
3.1.2 Visi dan Misi Desa Wringinrejo	47
3.1.3 Kebijakan Pembangunan Desa Wringinrejo	49

3.1.4	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wringinrejo.....	51
3.1.5	Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Desa Wringinrejo	51
3.2	Pelaksanaan Penelitian.....	62
3.3	Temuan Penelitian	64
3.3.1	Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Laporan Keuangan Desa Wringinrejo	64
3.3.2	Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Wringinrejo	68
3.3.3	Transparansi Laporan Keuangan Desa Wringinrejo	72
3.3.4	Dampak Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Perwujudan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Wringinrejo ..	73
BAB IV PEMBAHASAN.....		78
4.1	Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Laporan Keuangan Desa Wringinrejo.....	78
4.2	Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Wringinrejo.....	83
4.2.1	Pelaporan Pertanggungjawaban Desa Wringinrejo.....	83
4.3	Transparansi Laporan Keuangan Desa Wringinrejo.....	88
4.4	Dampak Penerapan Siskeudes Pada Desa Wringinrejo.....	91
BAB V PENUTUP.....		87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Implikasi	88
5.3	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN		

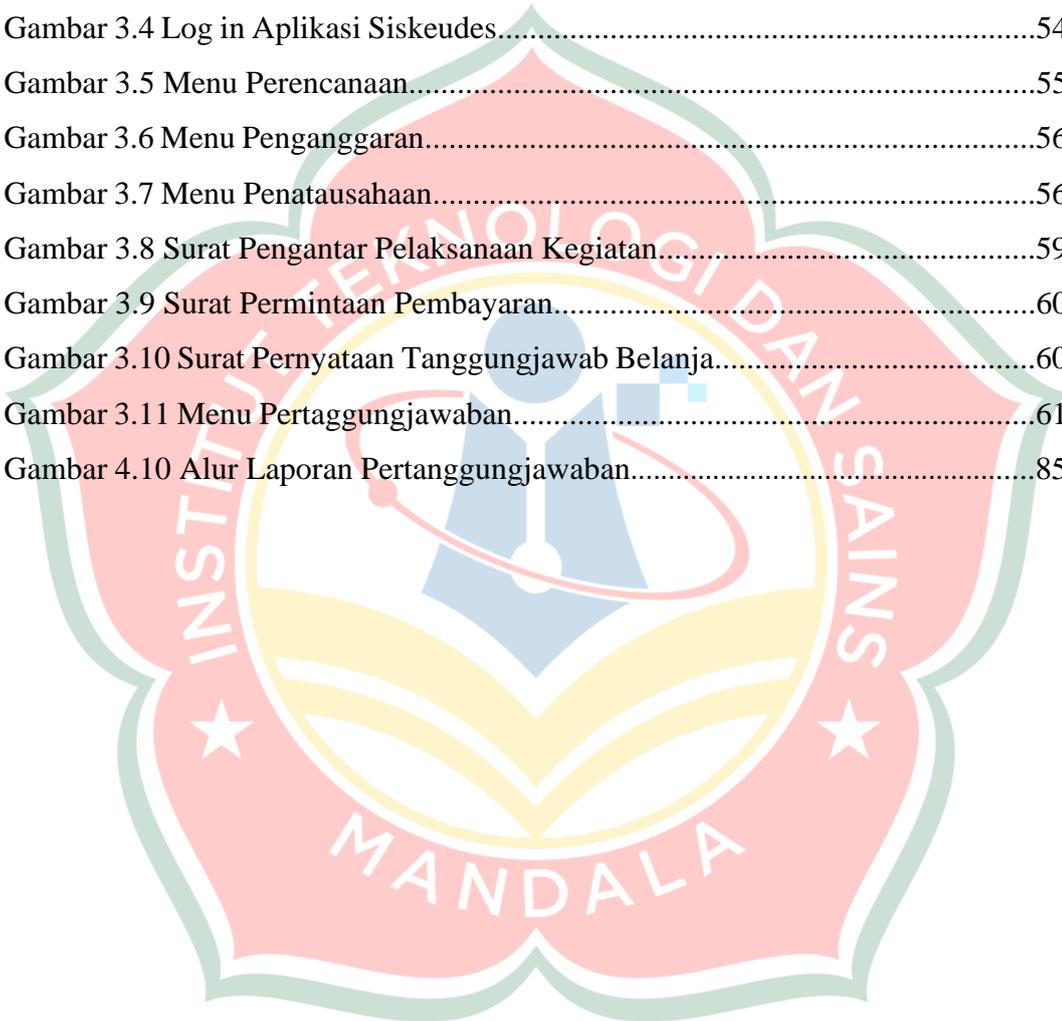
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	62
Tabel 4.1 Perbandingan Indikator Implementasi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	82
Tabel 4.2 Perbandingan Indikator Pelaporan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	87
Tabel 4.3 Perbandingan Indikator Transparansi Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Penelitian.....	37
Gambar 3.1 Peta Desa Wringinrejo.....	44
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	51
Gambar 3.3 Halaman Awal Aplikasi Siskeudes.....	54
Gambar 3.4 Log in Aplikasi Siskeudes.....	54
Gambar 3.5 Menu Perencanaan.....	55
Gambar 3.6 Menu Penganggaran.....	56
Gambar 3.7 Menu Penatausahaan.....	56
Gambar 3.8 Surat Pengantar Pelaksanaan Kegiatan.....	59
Gambar 3.9 Surat Permintaan Pembayaran.....	60
Gambar 3.10 Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.....	60
Gambar 3.11 Menu Pertanggungjawaban.....	61
Gambar 4.10 Alur Laporan Pertanggungjawaban.....	85



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Transkrip Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Bersama Informan
- Lampiran 3. Surat Edaran Permendagri Tentang Penerapan Siskeudes
- Lampiran 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
- Lampiran 5. Laporan APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran Desa
Menggunakan Aplikasi Siskeudes
- Lampiran 6. Banner Laporan APBDes dan Realisasi Anggaran Desa



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi dan dampak Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam menunjang perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Wringinrejo. Teknik Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada pengelolaan keuangan Desa Wringinrejo sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Perangkat desa yang bertugas dalam pengelolaan keuangan desa saling berkoordinasi untuk terwujudnya keuangan desa yang akuntabel dan transparan, terutama dalam pelaporan keuangan desa melalui Aplikasi Siskeudes dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa. Meskipun ada beberapa kendala ringan seperti kurangnya pemahaman penggunaan aplikasi ini, kendala tersebut masih bisa di atasi pemerintahan Desa Wringinrejo. Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa berdampak positif bagi Pemerintahan Desa Wringinrejo dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan karena dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa menggunakan Aplikasi Siskeudes menjadi lebih praktis, mudah dan aman. Akuntabilitas dan Transparansi dalam laporan keuangan Desa Wringinrejo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci: Laporan Keuangan Desa, Siskeudes, Akuntabilitas dan Transparansi



ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation and impact of the Village Financial System (Siskeudes) in supporting the realization of accountability and transparency of financial reports in Wringinrejo Village, Gambiran District, Banyuwangi Regency. This type of research uses qualitative methods with the data used being primary data and secondary data obtained by data collection techniques using observation, interviews and documentation. The informants in this research were the Village Head, Village Secretary, Head of Finance, Head of Planning and Head of Administration and General Affairs of Wringinrejo Village. Sampling technique was carried out using purposive sampling technique. The results of this research show that the implementation of the Village Financial System Application (Siskeudes) in the financial management of Wringinrejo Village has gone well in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. Village officials in charge of managing village finances coordinate with each other to create accountable and transparent village finances, especially in village financial reporting through the Siskeudes Application and accountability for village financial reporting. Even though there are some minor obstacles such as a lack of understanding of the use of this application, these obstacles can still be overcome by the Wringinrejo Village government. The Siskeudes application in managing village finances has had a positive impact on the Wringinrejo Village Government in realizing accountable and transparent financial reports because accountability for village financial reports using the Siskeudes Application becomes more practical, easier and safer. Accountability and transparency in Wringinrejo Village's financial reports are in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

Keywords: Village Financial Report, Siskeudes, Accountability and Transparency



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Penyelenggaraan pemerintahan selalu berkaitan dengan administrasi publik yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah *Good Governance* (Mardiasmo, 2002). Pendekatan ini membawa peran baru bagi administrasi publik dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Administrasi publik bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat transparan, dan akuntabilitas atau bertanggungjawab.

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik semakin meningkat, hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Perubahan mendasar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, membuat kerangka berpikir yang baru dalam manajemen keuangan desa yang melibatkan penggunaan sistem teknologi. Kerangka berpikir tersebut adalah tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam mengelola keuangan desa untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan sektor publik.

Usaha dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, pemerintah melibatkan teknologi informasi. Salah satu pengembangan sistem teknologi informasi oleh pemerintah bisa dikatakan sukses adalah Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Sistem Keuangan Desa dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes di dalamnya menyediakan fitur-fitur sederhana dan *user friendly*, sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (bpkp.go.id).

Sebelum diterapkan sistem pengelolaan keuangan menggunakan Aplikasi Siskeudes, pemerintahan Kabupaten Banyuwangi menerapkan sistem pengelolaan keuangan menggunakan *E-Village Budgeting*. *E-Village Budgeting* merupakan aplikasi pengelolaan keuangan desa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berlaku untuk skala desa. Namun dalam penerapan *E-Village Budgeting* dalam pengelolaan keuangan desa ini masih kurang memadai untuk menunjang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa, karena lingkup sistem tersebut masih kurang luas yaitu hanya lingkup Kabupaten Banyuwangi. Selain itu ada

keterbatasan akses dalam transparansi laporan keuangan menggunakan *E-Village Budgeting* yaitu masyarakat masih belum bisa melihat secara detail tentang Laporan APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran karena tidak ada website untuk publikasi laporan tersebut dan website *E-Village Budgeting* ini hanya bisa diakses oleh pemerintah desa dan kabupaten. Maka dari itu, dengan diterapkannya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang lingkupnya sudah nasional dan lebih luas dari *E-Village Budgeting* diharapkan dapat menanggulangi kendala-kendala tersebut sehingga dalam pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Siskeudes ini menyediakan website publikasi Laporan APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran sehingga masyarakat bisa melihat secara detail laporan tersebut dan hal tersebut bisa menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Penerapan Siskeudes dilaksanakan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor 143/8350/BPD tahun 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, bahwasanya aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa ini diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap mulai tahun 2016. Selanjutnya, diminta kepada Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan versi 2.0 yang

mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peresmian Aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) bersama BPKP yang bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja. Aplikasi Siskeudes versi 2.0 diharapkan dapat melengkapi kekurangan pada versi 1.0 dengan menambah fitur baru untuk mengikuti perubahan regulasi yang ada.

Penelitian ini memilih objek di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, karena Desa Wringinrejo merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sekretaris Desa Wringinrejo Bapak Sirojudin bahwasannya penerapan Aplikasi Siskeudes pada Desa Wringinrejo sudah dilakukan sejak Tahun 2021. Pengelolaan keuangan pada Desa Wringinrejo ini sebelumnya menggunakan Sistem *E-VB (E-Village Budgeting)* yang telah dibuat oleh pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dan lingkungannya hanya se-Kabupaten Banyuwangi. Namun sekarang di himbau oleh pemerintah pusat untuk menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang lingkungannya lebih luas yaitu tingkat Nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Menunjang Perwujudan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, serta terkait dengan hal tersebut, maka permasalahan yang timbul sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam menunjang perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi?
- 2) Apa dampak dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam menunjang perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
- 2) Untuk menganalisis dampak dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik dan supaya menjadi salah satu acuan dalam menerapkan sistem pencatatan laporan keuangan desa.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah diharapkan menjadi salah satu sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis dan mampu memperdalam wawasan pengetahuan tentang penerapan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik.

2) Bagi Pemerintah Desa

Manfaat penelitian bagi pemerintah desa yaitu supaya pemerintah desa mengetahui keefektifan, dampak, kekurangan dan kelebihan apa saja yang timbul dari penerapan sistem pencatatan keuangan digital sehingga dapat menjadi acuan dalam menerapkan sistem pencatatan laporan keuangan desa dimasa yang akan datang.

3) Bagi Akademisi

Manfaat penelitian bagi akademisi yaitu diharapkan bisa dijadikan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya terutama yang melaksanakan penelitian terkait laporan keuangan desa.

1.5 Penelitian terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Akmal, Gumilar, Santoso & Priyanti (2023) bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi (*Communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureucratic structure*) dalam mengimplementasikan kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Metode Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Siskeudes di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang kurang efektif, karena masih terdapat beberapa permasalahan sumberdaya yang ada serta belum efektifnya kinerja aparatur dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes karena minimnya pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi Informasi dan komputer. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada pelaksanaannya masih memprioritaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena dampak dari pandemi Covid- 19 dibandingkan pembangunan infrastruktur.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2023) bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa di desa Karangnanas dan desa Karangrau Kecamatan Sokaraja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan memiliki informan berjumlah enam orang yang telah dipilih memakai metode Snowball Sampling. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan wawancara semi terstruktur, observasi, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Karangnanas dan Desa Karangrautelah berlangsung dengan baik. Adapun tahapan pengelolaan sistem keuangan desa dimulai dari proses penginputan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan telah terstruktur dengan baik sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Akuntabilitas dan transparansi keuangan desa di Desa Karangnanas dan Desa Karangrau setelah menggunakan aplikasi siskeudes sangat membawa perubahan ke arah yang baik, diantaranya memudahkan Pemerintah Desa Karangnanas dan Desa Karangrau dalam proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa, dan juga menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Lodan, Dince dan Jaeng (2023) bertujuan untuk menganalisis Implementasi dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi

Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Riit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun informannya antara lain Bendahara dan Sekretaris Desa. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tahap reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penggunaan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Riit sudah berjalan dengan baik. Adapun tahapan pengelolaan sistem keuangan desa dimulai dari proses penginputan dokumen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah terstruktur dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Riit setelah menggunakan aplikasi siskeudes sangat membawa perubahan yang baik, diantaranya memudahkan pemerintah Desa Riit dalam proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa, menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Novita (2022) bertujuan untuk mengetahui peran aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam akuntabilitas dana desa dan kinerja aparatur di Desa Tulungrejo. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan sumber data diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan dan wawancara dengan narasumber terkait di Kantor Kepala Desa Tulungrejo. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan Siskeudes di Desa Tulungrejo belum maksimal dikarenakan sumber daya

manusia dalam hal ini pegawai desa belum menguasai sistem dengan baik sehingga berdampak kinerja pegawai. Diketahui bahwa dengan penerapan sistem yang maksimal akan memudahkan kinerja pegawai dan meningkatkan hasil kinerja pegawai. Maka dari itu, disarankan kepada pemerintah daerah dalam mengevaluasi implementasi sistem ini diberikan pula pelatihan dan pendampingan sehingga akan memudahkan pegawai dalam memahami kinerja sistem ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Endang (2020) bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dilihat dari aspek sumber daya di desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dilihat dari aspek sumber daya di desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis menurut Miles Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur dikategorikan terimplementasi dan faktor-faktor yang menghambat implementasi aplikasi sistem keuangan desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur adalah misi dan tujuan organisasi, strategi perencanaan, kebijaksanaan pemerintah dan jenis teknologi dan sosial budaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati, Citra, Elok Fitriyah (2019) bertujuan untuk mengetahui Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Peneliti menjelaskan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan desa sudah cukup baik, hanya saja ada ketidaksesuaian dari sisi pertanggungjawaban yakni belum bisa paparkan kepada masyarakat.

Tabel 1.1

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Akmal, Gumilar, Santoso & Priyanti (2023)	Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Siskeudes di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang kurang efektif, karena masih terdapat beberapa permasalahan sumberdaya yang ada serta belum efektifnya kinerja aparatur dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes karena minimnya pengetahuan dan kemampuan di	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian Kualitatif Deskriptif - Variabel yang digunakan yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) - Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel penelitian yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa - Objek penelitian yaitu Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang - Tahun penelitian yaitu 2023

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		bidang teknologi Informasi dan komputer. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada pelaksanaanya masih memprioritaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena dampak dari pandemi Covid-19 dibandingkan pembangunan infrastruktur		
2.	Hidayati (2023)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Karangnanas dan Desa Karangrautelah berlangsung dengan baik. Adapun tahapan pengelolaan sistem keuangan desa dimulai dari proses penginputan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan telah terstruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian yaitu Kualitatif - Variabel yang digunakan yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) - Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian yaitu Desa Karangnanas dan Desa Karangraut Kecamatan Sokaraja - Tahun penelitian yaitu 2023

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>dengan baik sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Akuntabilitas dan transparansi keuangan desa di Desa Karangnanas dan Desa Karangrau setelah menggunakan aplikasi siskeudes sangat membawa perubahan ke arah yang baik, diantaranya memudahkan Pemerintah Desa Karangnanas dan Desa Karangrau dalam proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa, dan juga menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku.</p>		
3.	Lodan, Dince & Jaeng (2023)	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penggunaan aplikasi sistem keuangan desa di Desa Riit sudah berjalan dengan baik. Adapun tahapan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian yaitu Kualitatif Deskriptif - Variabel yang digunakan yaitu Sistem Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel penelitian hanya Akuntabilitas Keuangan Desa - Objek penelitian yaitu Desa Riit

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>pengelolaan sistem keuangan desa dimulai dari proses penginputan dokumen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah terstruktur dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Riit setelah menggunakan aplikasi siskeudes sangat membawa perubahan yang baik, diantaranya memudahkan pemerintah Desa Riit dalam proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa, menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Desa (Siskeudes)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun penelitian yaitu 2023

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Novita (2022)	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan Siskeudes di Desa Tulungrejo belum maksimal dikarenakan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai desa belum menguasai sistem dengan baik sehingga berdampak kinerja pegawai. Diketahui bahwa dengan penerapan sistem yang maksimal akan memudahkan kinerja pegawai dan meningkatkan hasil kinerja pegawai. Maka dari itu, disarankan kepada pemerintah daerah dalam mengevaluasi implementasi sistem ini diberikan pula pelatihan dan pendampingan sehingga akan memudahkan pegawai dalam memahami kinerja sistem ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian yaitu Kualitatif Deskriptif - Variabel yang digunakan yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) - Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel penelitian yaitu Kinerja Aparatur Desa - Objek penelitian yaitu Desa Tulungrejo - Tahun Penelitian yaitu 2022

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Endang (2020)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur dikategorikan terimplementasi dan faktor-faktor yang menghambat implementasi aplikasi sistem keuangan desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur adalah misi dan tujuan organisasi, strategi perencanaan, kebijaksanaan pemerintah dan jenis teknologi dan sosial budaya.	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian yaitu Kualitatif Deskriptif - Variabel yang digunakan yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) - Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel penelitian yaitu Aspek Sumber Daya - Objek penelitian yaitu Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Bartim - Tahun penelitian yaitu 2020
6.	Sulistyowati, Citra & Fitriyah (2019)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan desa sudah cukup baik, hanya saja ada ketidaksesuaian dari sisi pertanggungjawaban yakni belum	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian yaitu Kualitatif Deskriptif - Variabel yang digunakan yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya meng analisis bagaimana implementasi Sistem Keuangan Desa - Objek penelitian yaitu Kecamatan

No	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		bisa paparkan kepada masyarakat	- Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi	Besuki Kabupaten Situbondo - Tahun penelitian yaitu 2019

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya diantaranya, Metode penelitian menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif, variabel penelitian yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa. Perbedaan lainnya yaitu pada objek penelitian dan tahun penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih objek Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dan dilaksanakan pada tahun 2023-2024.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 *Good Village Governance*

Pengertian *Good Village Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) mendefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun

administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Dalam konteks pemerintahan yang baik, pemerintah ditempatkan sebagai fasilitator, sementara tugas untuk memajukan pembangunan terletak pada semua komponen negara, meliputi dunia usaha dan masyarakat. Pemerintahan yang baik ditandai oleh terbentuknya “kemitraan” antara pemerintah dengan masyarakat, organisasi politik, organisasi massa, LSM, dunia usaha serta individu secara luas guna terciptanya manajemen pembangunan yang bertanggungjawab.

UNDP (*United Nation Development Program*) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *Good Governance*, meliputi:

1. *Participation*

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif

2. *Rule of Law*

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia

3. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses -proses, lembaga-lembaga dan informasi secara

langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor

4. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*

5. *Consensus Orientation Good Governance*

Consensus Orientation Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur

6. *Equity*

Semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka

7. *Efficiency and Effectiveness*

Proses -proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin

8. *Accountability*

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah

keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi

9. *Strategic Vision*

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money (economy, efficiency, dan effectiveness)*.

1.6.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut dapat menghasilkan pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa meliputi semua kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan.

Dokumen perencanaan keuangan desa memuat RPJM desa dan RKP desa berdasarkan rencana pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. RPJM Desa tersebut terkait dengan RPJM Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM desa akan ditetapkan paling lama tiga bulan setelah walikota menjabat.

RKP Desa merupakan pengembangan satu tahun dari RPJM Desa. RKP Desa meliputi rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penguatan masyarakat desa.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa.

Pelaksanaan anggaran desa yang sebelumnya ditetapkan pada tahun menghasilkan transaksi pendapatan dan belanja desa. Semua pendapatan dan pengeluaran desa sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan desa akan diproses melalui rekening kas desa. Jika desa tersebut belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya, maka rezimnya akan ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua pemasukan dan pengeluaran di desa harus dibuktikan dengan alat bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Pengelolaan adalah pemasukan dan pengeluaran yang harus dilakukan bendahara desa. Walikota desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus mengangkat bendahara desa, yang memutuskan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan dalam rangka pelaksanaan akuntansi desa harus diangkat berdasarkan APBD.

Bendahara desa wajib menjelaskan laporan. Laporan tahunan akan disampaikan kepada walikota desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setiap bulan. Pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa adalah:

1) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan baik tunai maupun kredit untuk mencatat berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penyetoran dan penarikan, serta untuk mencatat kesalahan perbankan dan akuntansi. Buku kas umum dapat dianggap sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku Kas Pembantu

Pajak Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.

d. Pelaporan

Ada dua tingkat pelaporan untuk pelaporan kegiatan anggaran desa.

1. Laporan berkala. Laporan pelaksanaan penggunaan dana ADD, yang dibuat secara berkala setiap semester atau setiap enam bulan, tergantung pada tingkat pembayaran dan pertanggungjawaban, termasuk realisasi pendapatan dan biaya ADD.
2. Laporan akhir penggunaan ADD berisi implementasi dan penggunaan dana, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Pertanggungjawaban Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun

anggaran berkenaan ditetapkan dengan peraturan desa dengan disertai dengan:

1. Laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan.

1.6.3 Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2016) pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk menciptakan proses akuntabilitas publik yang baik diperlukan saluran pertanggungjawaban publik yang bersistem dan berkoordinasi dengan baik.

Sedangkan menurut Mulgan (1997), akuntabilitas publik mempunyai empat tahapan, yaitu:

- 1) Pelaporan, merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atau melaporkan hasil kinerjanya dalam mengelola sumber daya atau dana publik
- 2) Pencarian informasi atau investigasi, merupakan kewenangan dari masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik

- 3) Penilaian atau verifikasi, merupakan kewenangan dari masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik
- 4) Pengendalian atau pengarahan, merupakan kewenangan dari masyarakat untuk capaian kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya publik.

Bentuk pertanggungjawaban publik oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan empat bentuk cakupan akuntabilitas publik yaitu:

- 1) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah

- 2) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah

- 3) Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Setiap dana yang dialokasikan harus melalui suatu proses atau prosedur yang jelas dan pasti

- 4) Akuntabilitas Hukum dan Peradilan (*Accountability for Probitiy and Legality*)

Setiap penggunaan dana publik harus berdasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasinya.

1.6.4 Transparansi

Menurut Mahmudi (2016) transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.

Menurut Ritonga dan Syahrir (2016) transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh publik, namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

1.6.5 Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Siskeudes yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Sistem Keuangan Desa dikembangkan dalam rangka meningkatkan

kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes di dalamnya menyediakan fitur-fitur sederhana dan *user friendly*, sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (bpkp.go.id).

Penerapan Siskeudes dilaksanakan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor 143/8350/BPD tahun 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, bahwasanya aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa ini diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap mulai tahun 2016. Selanjutnya, diminta kepada Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa awalnya menggunakan versi 1.0 yang mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun pada tahun 2018 Aplikasi Siskeudes diganti versi 2.0 yang mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peresmian Aplikasi Siskeudes versi 2.0 telah dilaksanakan oleh

Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) bersama BPKP yang bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja.

1.6.6 Laporan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengelolaan Keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 memiliki asas-asas sebagai berikut:

- 1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- 2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1.7 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi masalah pada penelitian yang dilakukan supaya tidak meluas, sehingga penelitian ini lebih fokus pada pokok permasalahan serta memudahkan peneliti dalam mencapai tujuan. Terdapat batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini fokus pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi
2. Penelitian ini fokus pada pengelolaan laporan keuangan Desa Wringinrejo Tahun 2023.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menguraikan data secara deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber sesuai dengan pernyataan yang apa adanya. Metode penelitian kualitatif dipilih karena pendekatan yang digunakan metode ini dapat memberikan rincian lengkap mengenai suatu fenomena yang sulit diungkapkan.

Menurut Moleong (2007) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami tentang suatu fenomena yang dialami subjek dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Terdapat lima studi pada penelitian kualitatif menurut Creswell (2007) yaitu sebagai berikut:

1. Studi Naratif, merupakan studi pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan observasi, kemudian menceritakan kembali cerita tentang pengalaman yang dialami individu maupun peristiwa penting dalam kehidupan partisipan.
2. Studi Fenomenologi, merupakan studi pengumpulan data yang dilakukan secara lebih fokus pada penemuan kedalaman informasi atas fenomena

yang sedang diteliti, sehingga berbagai dinamika didalam fenomena tersebut dapat terangkat ke permukaan.

3. Studi *Grounded Theory*, merupakan studi yang dilakukan dengan memanfaatkan keyakinan, kausalitas, nilai maupun ideologi partisipan.
4. Studi *Etnografis*, merupakan studi yang dilakukan dengan pendekatan holistik untuk memotret kelompok kebudayaan tertentu yang analisisnya memanfaatkan data emik (pandangan partisipan) dan data etis (pandangan peneliti) untuk tujuan yang praktis demi kepentingan kelompok kebudayaan itu sendiri.
5. Studi Kasus, merupakan studi dengan cara mengumpulkan data dilakukan secara komprehensif menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh gambaran keseluruhan tentang kasus yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan berbagai metode pengumpulan data. Hal ini dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang dapat menggambarkan masalah yang diteliti secara keseluruhan dari sumber data atas sistem yang terkait dari penelitian ini.

2.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2019) *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menggunakan *Purposive Sampling* dalam pengambilan

sampel bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang memerlukan kriteria-kriteria tertentu supaya sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian. Karena sampel yang diperoleh nantinya akan mengetahui permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

Kriteria informan dalam penelitian ini yaitu seseorang yang memahami dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, terdiri atas:

- 1) Kepala Desa Wringinrejo
- 2) Sekretaris Desa Wringinrejo
- 3) Kaur Keuangan Desa Wringinrejo
- 4) Kaur Perencanaan Desa Wringinrejo
- 5) Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Wringinrejo

Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yang telah menerapkan Siskeudes) untuk melakukan penelitian. Dengan tujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam menunjang perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dan juga untuk menganalisis dampak dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap perwujudan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada desa tersebut.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berupaya untuk menganalisis mengenai pengelolaan keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa

(Siskeudes) yang dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Data yang akan digunakan yaitu menggunakan Data Primer dan Data Sekunder.

a) Data Primer

Diperoleh melalui wawancara secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek peneliti baik secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan dan hasil pengujian. Data primer ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di Kantor Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

b) Data Sekunder

Berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari Desa Wringinrejo, seperti:

- Sejarah Desa
- Struktur Organisasi
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- Berbagai Laporan input dan output pada Sistem Keuangan Desa.

Adapun metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi langsung terhadap fokus penelitian yakni implementasi Sistem Keuangan Desa

(Siskeudes) dan juga dampak dari Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam menunjang perwujudan Akuntabilitas dan Transparansi laporan keuangan Desa Wringinrejo.

Menurut Sugiyono (2019) teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2007) wawancara merupakan percakapan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan dengan maksud tertentu.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang memang memenuhi kriteria-kriteria dalam permasalahan penelitian, ataupun yang memiliki pengalaman dan terkait dalam objek yang diteliti. Melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara peneliti dengan informan dengan maksud untuk memperoleh informasi dari informan. Sasaran atau informan wawancara ditetapkan berdasarkan fokus penelitian. Dimana hasil dari wawancara tersebut nantinya akan direkam melalui rekaman suara lalu dicatat oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2019) mengemukakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,

atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, dan sketsa. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, dan film. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai berikut:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
- Struktur Organisasi Desa
- Laporan Realisasi Anggaran Desa
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Foto-foto wawancara dan kegiatan pelaporan anggaran desa dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

2.4 Tahapan Penelitian

Tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1
Tahapan Penelitian

1) Studi Literatur

Pada studi literatur berisikan teori-teori yang digunakan untuk mendukung kelengkapan penulisan laporan tugas akhir. Dalam pelaksanaannya yaitu dengan mengumpulkan data atau informasi yang didapat dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas akhir ini yang berbentuk studi pustaka.

2) Identifikasi Masalah

Melakukan survei ke perusahaan agar mendapatkan bahan yang akan diteliti sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Setelah melakukan survei itu,

barulah mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di perusahaan sehingga masalah yang akan diteliti bisa fokus pada satu permasalahan saja. Jika permasalahan dapat teridentifikasi maka langkah selanjutnya adalah menentukan penetapan tujuan.

3) Merumuskan Masalah

Perumusan yang baik akan membantu dalam menyelesaikan masalah, karena dalam tujuan terdapat suatu batasan yang terinci atas ruang lingkup permasalahan utama. Dengan demikian pembahasan masalah akan lebih terarah dan terstruktur.

4) Menetapkan Tujuan

Tujuan perlu ditetapkan dalam melakukan sebuah penelitian agar penelitian tersebut fokus pada apa tujuan yang diinginkan.

5) Observasi Lapangan Dan Perizinan

Pada tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur saat melakukan observasi di tempat penelitian. Dan setelah melaksanakan observasi peneliti meminta izin dari tempat penelitian untuk melaksanakan penelitian pada tempat tersebut.

6) Mengumpulkan Data

Agar dalam pelaksanaan penelitian dapat dijalankan dengan mudah serta sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka diperlukan langkah pemecahan yang baik dan pada pemecahan masalah tersebut dibutuhkan

data-data pendukung, adapun data-data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder

7) Mengolah Data

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah pengolahan data dengan metode-metode yang sudah ditetapkan. Pengolahan data berisi mengenai pengolahan data-data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data untuk mendapatkan tujuan dari penelitian. Pengolahan data ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh bisa dianalisa dan kemudian memudahkan dalam mengambil kesimpulan atau menjawab permasalahan dari penelitian ini.

8) Analisis Data

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya dapat menganalisis lebih mendalam dari hasil pengolahan data tersebut. Analisa tersebut akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan pada perumusan masalah.

9) Menarik Kesimpulan

Pada bagian penutup ini berisikan tentang kesimpulan. Isi kesimpulan merupakan jawaban tujuan dari penelitian. Sehingga dengan terjawabnya semua tujuan penelitian, maka penelitian tersebut telah terselesaikan.

2.5 Pendekatan Dalam Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana data yang diperoleh di dapat dari informan itu sendiri. Dengan mempertimbangkan data yang

diperoleh di lapangan supaya selaras dengan tujuan penelitian, sehingga pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2019) merupakan metode penelitian yang berdasarkan filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen atau kunci sebagai teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara terperinci dari permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin dari seorang individu, kelompok atau suatu fenomena. Dalam penelitian kualitatif, manusia sebagai instrumen penelitian dan hasil penulisan yang berbentuk kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dan sesuai dengan fakta.

Rangkaian dari analisis data bisa dimulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan setelah itu data yang diperoleh disusun dari awal sampai akhir penelitian. Dengan cara yang mudah dipelajari dan mampu menyimpulkan hasil penelitian, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh penulis sendiri ataupun pembaca. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data secara mendalam dengan mendeskripsikan dan mengkaji, kemudian

menafsirkan menggunakan metode MDAP (*Manual Data Analysis Procedure*) dari data yang telah diperoleh dari informan.

Ada beberapa langkah dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilahan data untuk dirangkum, dengan memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Hasil data reduksi berdasarkan tema dan kategori tertentu yang nantinya akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari hasil pengamatan, sehingga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh.

2) Penyajian data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif teknik penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik dan lain sebagainya.

3) Penarikan kesimpulan/verifikasi data

Langkah yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru. Hasil temuan bisa berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah dilakukan penelitian ini menjadi jelas.

2.6 Keabsahan Penelitian

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan kesahihan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji data yang sudah diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2007) Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Pada keabsahan penelitian ini, peneliti menggunakan *trustworthiness* (kepercayaan) dari penelitian:

1. Validitas (*credibility*)

Validitas sangat penting dalam sebuah penelitian. Pada penelitian kualitatif, istilah validitas dimaknai sebagai kredibilitas, yaitu kepastian bahwa suatu kriteria telah diukur sesuai dengan yang dimaksudkan oleh peneliti. Kredibilitas data dapat dicapai dengan cara triangulasi, baik dari segi sumber data, peneliti, metode, dan teori serta dilengkapi dengan melakukan cek ulang antara data dengan informan (mengembalikan data kepada informan untuk memperoleh validasinya), yang juga bisa dilakukan dengan memperlama kontak dengan informan.

2. Reliabilitas (*dependability*)

Reliabilitas ditandai dengan kekonsistenan, dalam artian apabila penelitian diulang maka hasilnya konsisten. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, kriteria konsisten atau reliable ini disebut dengan pendekatan *dependability* atau *auditability*. *Dependability* dapat diusahakan dengan cara pelacakan audit (*audit trail*), meskipun penelitian

kualitatif juga harus memahami instabilitas dari hasil sebuah penelitian karena perubahan itu selalu ada.

3. Obyektifitas (*neutrality*)

Obyektif bermakna netral dan dapat dikonfirmasi. Dalam Penelitian kualitatif, meskipun *subyektifitas* peneliti dan informan tidak dapat dipisahkan, hal ini bukan berarti peneliti bebas untuk memasukkan pendapat pribadinya dalam usahanya untuk merumuskan kesimpulan penelitian. Objektivitas penting untuk menghindarkan peneliti dari bias-bias personal, sehingga hasil penelitian dapat dikonfirmasi dengan sumber lain atau oleh pihak lain. Prosedur yang dapat digunakan untuk menjaga objektivitas penelitian kualitatif, antara lain dengan cara peneliti secara terbuka menyampaikan identitas diri yang kemungkinan dapat mempengaruhi kesimpulan yang dilakukan. Selain itu, objektivitas dapat diperoleh dengan melibatkan orang lain dalam melakukan analisis.

4. Kemampuan aplikasi (*applicability / transferability*)

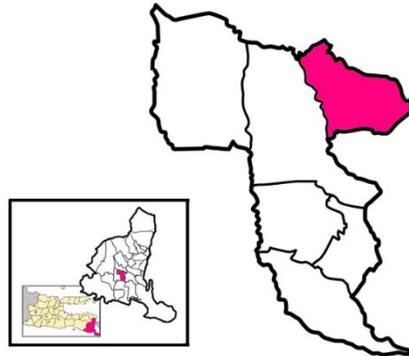
Kemampuan aplikasi adalah validitas eksternal dari penelitian, yaitu ketika hasil penelitian dapat ditarik generalisasinya ke dalam populasi. Meskipun generalisasi bukan merupakan tujuan dari penelitian kualitatif, akan tetapi *Transferability* dapat diartikan juga dengan kemungkinan bahwa hasil penelitian dapat ditransfer kepada pihak lain, terutama pada peneliti lain, maupun kepada informan penelitian.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Orientasi Kancan Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Desa Wringinrejo



Gambar 3.1 Peta Desa Wringinrejo
(Sumber data: RPJMDesa Wringinrejo)

Desa Wringinrejo merupakan salah satu dari desa di wilayah Kecamatan Gambiran, yang terletak 12 Km ke arah utara dari Kecamatan Gambiran. Secara geografis Desa Wringinrejo memiliki luas wilayah seluas 584,874 Ha di ketinggian 130 dpl. Adapun batas-batas wilayah Desa Wringinrejo sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Desa Kembiritan Kecamatan Genteng
- Sebelah Timur: Desa Tamanagung Kecamatan Cluring
- Sebelah Selatan: Desa Yosomulyo Kecamatan Gambiran
- Sebelah Barat: Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng

Iklm Desa Wringinrejo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut

Mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanan yang ada di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran.

Desa Wringinrejo terdiri dari 5 dusun dengan 44 RT (Rukun Tetangga) dan 14 RW (Rukun Warga) diantaranya:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1) Dusun Mulyorejo Utara | 8 RT 2 RW |
| 2) Dusun Mulyorejo Selatan | 7 RT 2 RW |
| 3) Dusun Krajan | 12 RT 3 RW |
| 4) Dusun Toyamas | 9 RT 3 RW |
| 5) Dusun Tamanrejo | 8 RT 3 RW |

Data tersebut berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025.

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Wringinrejo pada tahun 2019 sebanyak 6.466 jiwa, yang terdiri dari:

- Jumlah penduduk laki-laki : 3.259 jiwa
- Jumlah penduduk perempuan : 3.207 jiwa

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama yaitu sebagai berikut:

- Islam : 6.462 jiwa
- Kristen : 4 jiwa
- Katholik : 0 jiwa
- Hindu : 0 jiwa
- Budha : 0 jiwa

b. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Keadaan sosial pada Desa Wringinrejo yaitu banyaknya kegiatan Ormas (Organisasi Masyarakat) seperti Remaja Masjid, Kelompok Pemuda, Jamiyah Yasin, PKK, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat. Sedangkan keadaan ekonomi Desa Wringinrejo mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, karena 50% dari luas wilayah desa masih berupa persawahan dan perkebunan. Tetapi saat ini generasi muda banyak yang bekerja sebagai PMI (Pekerja Migran Indonesia) di berbagai negara, dan hal tersebut sangat berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat. PMI ini juga berdampak dalam membawa modal untuk menggerakkan perekonomian desa.

c. Sarana dan Prasarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber dari diri sendiri (individual) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang. Supaya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1) Prasarana Kesehatan

- Posyandu : 10 unit
- Puskesmas Pembantu : 1 unit

- Rumah Sakit Swasta : 1 unit
- 2) Prasarana Pendidikan
- Taman Kanak-kanak : 6 unit
 - SD/MI : 6 unit
 - SLTP/MTs : 2 unit
 - SLTA/MA : 0 unit
 - TPA/TPQ : 10 unit
- 3) Prasarana Umum Lainnya
- Masjid : 7 unit
 - Mushola : 30 unit
 - Lapangan Olahraga : 2 unit

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan tahap keberlanjutan yang dimulai dengan proses menyiapkan masyarakat supaya mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses ini membutuhkan keterlibatan masyarakat supaya masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil, serta mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

3.1.2 Visi dan Misi Desa Wringinrejo

- **Visi Desa Wringinrejo**

Visi Desa Wringinrejo secara normatif menjadi tanggungjawab kepala desa. Namun dalam penyusunannya

melibatkan segenap warga Desa Wringinrejo melalui rangkaian kegiatan diskusi formal dan informal, sehingga dirumuskan dan ditetapkan Visi Desa Wringinrejo sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Desa Wringinrejo yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan sejahtera”

- Misi Desa Wringinrejo

Dalam meraih keberhasilan Visi Desa Wringinrejo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Wringinrejo sebagai berikut:

1. Penempatan agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sadar kebersihan, cepat tanggap untuk berobat dan peningkatan pendidikan dengan tuntas wajib belajar
3. Pemberian tambahan bantuan modal serta pendampingan kepada BUMDES
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari seluruh kekuatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan
5. Meningkatkan komunikasi dengan segenap komponen masyarakat
6. Meningkatkan potensi pertanian sebagai sumber pendapatan utama masyarakat

7. Meningkatkan pembangunan guna untuk percepatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan sarana dan prasarana umum
8. Meningkatkan profesionalisme perangkat desa sebagai pelayan masyarakat

3.1.3 Kebijakan Pembangunan Desa Wringinrejo

a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi:

a) Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat

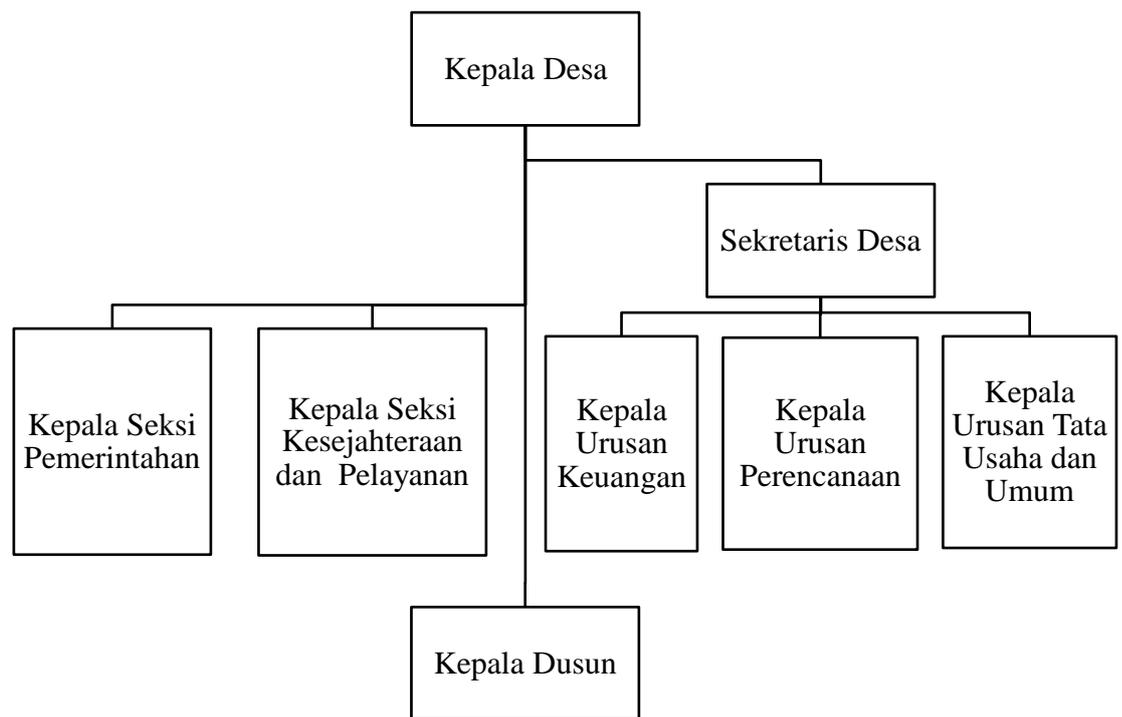
Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti:

1. Wajib belajar anak didik 9 tahun, dengan target 6 tahun kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat yang putus sekolah
2. Penyediaan air bersih bagi semua dusun, dengan memanfaatkan sumber air yang ada secara optimal, termasuk mengurangi volume kehilangan air
3. Revitalisasi MCK, sanitasi dan drainase rumah tangga
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Poskesdes sampai pelayanan rawat inap, memberikan pelayanan pengobatan gratis bagi yang RTM (Rumah Tangga Miskin), melengkapi alat-alat kesehatan ibu, anak dan lansia
5. Revitalisasi peran dan fungsi Posyandu

- b) Mengoptimalkan potensi pertanian
 - 1. Memanfaatkan dan melestarikan budidaya burung Tyto Alba Sebagai predator alami tikus sawah
 - 2. Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran dan bendung
 - 3. Mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada
 - 4. Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui HIPPA dan didukung oleh PPL Pertanian
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan mikro
 - 1. Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam yang tersebar di tingkat dusun dan desa, terutama kelompok PKK
 - 2. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku
 - 3. Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan
 - 4. Penguatan modal dan fungsi BUMDes
- b. Potensi dan Masalah
- c. Program Pembangunan Desa

3.1.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wringinrejo

Berdasarkan peraturan Bupati Banyuwangi nomor 40 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, struktur organisasi pemerintahan Desa Wringinrejo sebagai berikut:



Gambar 3.2
Struktur Organisasi Desa Wringinrejo
(Sumber data: RPJMDesa Wringinrejo)

3.1.5 Gambaran Umum Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Desa Wringinrejo

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Sistem Keuangan Desa

dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Penerapan Aplikasi Siskeudes pada Desa Wringinrejo telah dilakukan dari tahun 2021 hingga saat ini berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri nomor 143/8350/BPD tahun 2015 bahwasanya aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa ini diberlakukan untuk seluruh desa. Selanjutnya, diminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penggunaan Aplikasi Siskeudes pada Desa Wringinrejo dalam pengelolaan keuangan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Siskeudes ini merupakan tugas perangkat desa yang turut serta dalam mengelola keuangan desa, terutama kaur keuangan atau bendahara desa.

Dalam proses pencatatan laporan keuangan pada aplikasi Siskeudes dilakukan oleh kaur keuangan atau bendahara desa dan dibantu oleh sekretaris desa. Pada proses pencatatan ini, kaur keuangan tidak semerta-merta mencatat laporan tersebut tanpa adanya data yang sah. Sebelum melakukan pencatatan, kaur keuangan desa memerlukan hasil perencanaan dan penganggaran dari Pelaksana Kegiatan (PK) jika

ada kegiatan yang akan dilakukan. Semisal akan dilaksanakan pembangunan desa, sebelum melaksanakan pembangunan itu PK harus membuat laporan perencanaan dan juga penganggaran yang dibutuhkan selama proses pembangunan hingga pembangunan selesai. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada kaur keuangan untuk dicatat di aplikasi Siskeudes.

Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi online yang hanya bisa di akses menggunakan komputer yang di dalamnya sudah terinstal *Microsoft Office*, sehingga untuk komputer yang tidak terinstal *Microsoft Office* tidak dapat menggunakan fitur ini atau aplikasi ini. Karena untuk memasukkan/menginput data ke dalam aplikasi ini harus menggunakan *Microsoft Office*, jika tidak ada *Microsoft Office* di dalam komputer maka tidak bisa memasukkan data ke dalam aplikasi tersebut. Pada Desa Wringinrejo sudah ada komputer khusus yang telah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk digunakan dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes. Tidak hanya menggunakan komputer desa, perangkat desa bisa mengakses aplikasi tersebut menggunakan komputer pribadi yang sudah terinstal *Microsoft Office*.

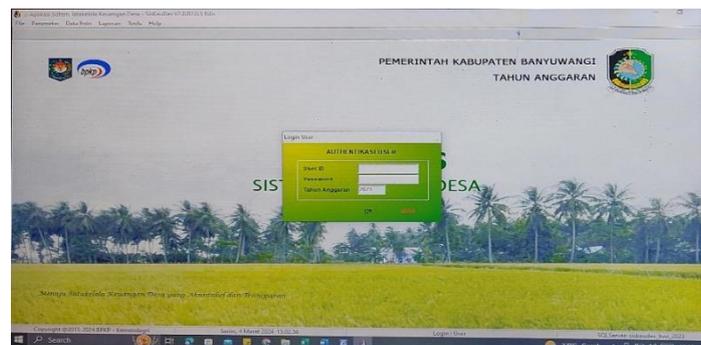
Aplikasi Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan Rilis Versi 2.0. Tampilan muka Aplikasi Siskeudes versi 2.0 yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Halaman Awal Aplikasi Siskeudes



Gambar 3.3
Halaman Awal Aplikasi Siskeudes

2. Log in Akun Siskeudes

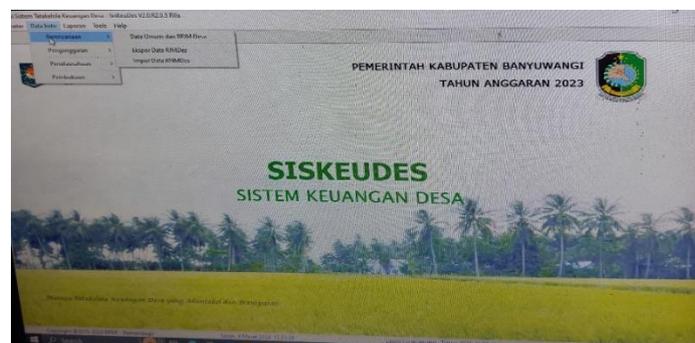


Gambar 3.4
Log in Akun Siskeudes

Untuk dapat masuk ke Aplikasi Siskeudes, terdapat menu *login user* yang harus diisi dengan benar agar dapat masuk ke dalam Aplikasi Siskeudes. Tujuan *login user* ini adalah agar melindungi data dalam Aplikasi Siskeudes dan dipastikan diisi oleh *user* yang telah memiliki otorisasi. *Login User* juga menunjukkan level otoritas dalam penggunaan Aplikasi Siskeudes, yaitu Level Operator (untuk pemerintah desa), Level Supervisor (untuk pemerintah kecamatan) dan Level Admin (untuk pemerintah daerah/DPMD).

Secara umum untuk pemerintah desa, *login user* untuk Aplikasi Siskeudes diisi dengan: User ID: *user* dengan password *user*. *Login user* Aplikasi Siskeudes selanjutnya akan diatur oleh Admin Siskeudes pemda, sehingga untuk setiap desa akan mendapat *user ID* dan *password* yang berbeda. Tahun Anggaran diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diinput.

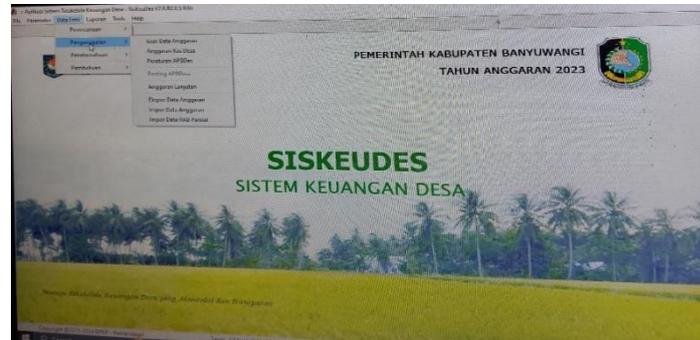
3. Menu Perencanaan



Gambar 3.5
Menu Perencanaan

Menu Perencanaan digunakan untuk melakukan proses entri data Data Umum Desa dan penyusunan perencanaan jangka menengah (RPJMDes) dan perencanaan tahunan (RKPDes). Sebagai langkah awal, dalam menu Perencanaan diinput terlebih dahulu Data Umum Desa. Penginputan data disarankan untuk dimulai secara berurut sesuai menu yang tersedia dalam aplikasi.

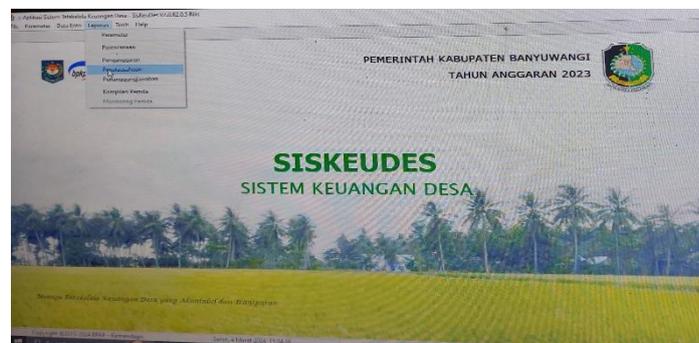
4. Menu Penganggaran



Gambar 3.6
Menu Penganggaran

Menu Penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data agar dilakukan secara berurut sesuai menu yang tersedia dalam Aplikasi Siskeudes.

5. Menu Penatausahaan



Gambar 3.7
Menu Penatausahaan

Menu Penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Fungsi penatausahaan keuangan adalah untuk pengendalian atas pelaksanaan APBDes. Pada tahap ini kaur keuangan diwajibkan

untuk memasukkan data penerimaan desa terlebih dahulu untuk bisa menginput data pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa sebelum mencatat pelaksanaan belanja desa. Terdapat 3 jenis penerimaan desa diantaranya sebagai berikut:

1) Penerimaan Tunai

Penerimaan desa yang diterima secara tunai oleh kaur keuangan, seperti pendapatan sewa tanah, kas desa dan pendapatan desa lainnya.

2) Penerimaan Bank

Penerimaan desa yang diterima dari transfer bank atau penerimaan yang masuk ke dalam RKD (Rekening Kas Desa). Penerimaan desa tersebut diterima melalui RKD diantaranya adalah pendapatan transfer dari dana desa, transfer dari alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi dari kabupaten Banyuwangi.

3) Penyetoran

Penyetoran ini digunakan apabila kaur keuangan menerima uang desa secara tunai yang kemudian harus disetorkan terlebih dahulu ke rekening kas desa dan tidak boleh langsung digunakan. Data penerimaan tunai akan otomatis masuk dalam daftar uang yang harus disetorkan pada menu penyetoran di Aplikasi Siskeudes.

Pada menu penatausahaan ini kaur keuangan bisa mengisi SPP Denitif. Dimana pada bagian ini kaur keuangan bisa melakukan pencatatan kegiatan belanja yang akan perlu dilakukan pencairan dananya sesuai dengan sumber dana dan bidang kegiatannya. Bidang tersebut diantaranya adalah bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, kegiatan penginputan data atau pembuatan SPP dapat dilakukan ketika kegiatan sudah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dimana dalam pembuatan SPP bukti diperlukan sebagai penyesuaian pencatatan dengan dana yang sudah dicairkan. Setelah pembuatan SPP denitif selesai, sekretaris dan kaur keuangan desa membawa dokumen-dokumen yang perlu dicairkan. Dengan menggunakan aplikasi Siskeudes ini dokumen-dokumen yang perlu dicairkan dapat langsung dicetak. Ada 3 dokumen yang otomatis tersusun pada saat SPP terselesaikan diantaranya:

1. Surat Pengantar Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa

PEMERINTAH DESA WRINGINREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 0034/SPP/07.2009/2023
SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
KEPALA DESA WRINGINREJO
Di tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Desa Nomor 03 Tanggal 23 October 2023 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

a. Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
b. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Des.
c. Kegiatan : Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian
d. Tahun Anggaran : 2023
e. Keperluan : Listrik Bln Januari
f. Jumlah Diminta : Rp. 4/6.500,00
(Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Wringinrejo, 08 March 2023
Pelaksana Kegiatan,
MUHAMMAD ZUHDI, S.Kom

Printed by Siskoudes 08/05/2024 07:44:37 Halaman 1

Gambar 3.8
Surat Pengantar Pelaksana Kegiatan

2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

PEMERINTAH DESA WRINGINREJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegi
3. Kegiatan : Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian
4. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Nomor : 0034/SPP/07.2009/2023

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencatatan s.d Yang Lulus (Rp)	Permintaan Selanjut (Rp)	Jumlah Bangsal Satisfi (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Bunga Pos	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
2	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
3	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	4.599.442,76	4.599.000,00	0,00	4.599.000,00	9.442,76
4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gasoli/Ulang Tabung Pemadam Kebat	7.000.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	5.600.000,00
5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	11.779.800,00	625.000,00	0,00	625.000,00	11.154.800,00
6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	32.853.958,00	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00	27.388.958,00
7	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbl-umbl/Spenduk	1.524.900,00	0,00	0,00	0,00	1.524.900,00
8	5.2.1.09.	Belanja Pakisan/Dinas/Seragam/Aktibut	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
9	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	36.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	30.000.000,00
10	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	6.925.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	6.400.000,00
11	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	13.000.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	12.400.000,00
12	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
13	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	12.000.000,00	865.800,00	478.500,00	1.342.300,00	10.657.700,00
14	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.400.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	2.020.000,00
15	5.2.5.04.	Belanja Jasa Langganan Telepon	2.400.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	1.860.000,00

Halaman 1

Gambar 3.9
Surat Permintaan Pembayaran

3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

Nomor : 0034/SPP/07.2009/2023

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PEMERINTAH DESA WRINGINREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Bidang : BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
2. Sub Bidang : Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksim
3. Kegiatan : Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,

No.	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1 00039/KWT/07.2009/2023	Listrik	0021016733 Bank Jatim	476.500,00
Total				476.500,00

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

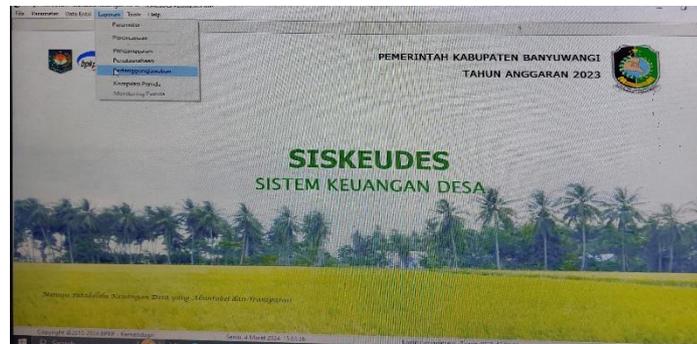
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Wringinrejo, 08 March 2023
Pelaksana Kegiatan,

MUHAMMAD ZUHDI, S.Kom

Gambar 3.10
Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

6. Menu Pertanggungjawaban



Gambar 3.11
Menu Pertanggungjawaban

Menu pertanggungjawaban ini berisi laporan-laporan yang telah di susun mulai awal sampai akhir dan menu ini digunakan untuk mencetak laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah desa, diantaranya adalah:

- Laporan Realisasi Anggaran Desa
- Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan
- Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan, triwulan dan semesteran)
- Laporan Kekayaan Milik Desa
- Laporan Realisasi Anggaran per Sumber Dana
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
- Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 22

3.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan yaitu pada bulan Februari-Maret di Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi lebih tepatnya di kantor Desa Wringinrejo dan lingkungan sekitar. Penelitian ini menggunakan informan sebanyak 5 (lima) orang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Peran Dalam Implementasi Siskeudes
1	Mu'adim, S.H.	Laki-laki	Kepala Desa Wringinrejo	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes - Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa - Menyetujui RAK Desa - Menyetujui SPP
2	Muhammad Sirojudin	Laki-laki	Sekretaris Desa Wringinrejo	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes - Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes, Rancangan perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes - Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes - Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa - Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

				- Koordinator pelaksana kegiatan anggaran dalam struktur pelaksana pengelolaan keuangan desa
3	Muhammad Zuhdi	Laki-laki	Kaur Keuangan Desa Wringinrejo	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun RAK Desa - Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes - Pelaksana kegiatan anggaran dalam struktur pelaksana pengelolaan keuangan desa
4	Maria Ratnawati	Perempuan	Kaur Perencanaan Desa Wringinrejo	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa - Mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya - Pelaksana kegiatan anggaran dalam struktur pelaksana pengelolaan keuangan desa
5	Farid Yahya	Laki-laki	Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Wringinrejo	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penataan administrasi perangkat desa - Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor - Pelaksana kegiatan anggaran dalam struktur pelaksana pengelolaan keuangan desa

(Sumber data: RPJMDesa Wringinrejo)

Penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara dengan beberapa perangkat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Kaur Perencanaan Desa dan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Wringinrejo. Wawancara ini dilaksanakan secara langsung di kantor Desa Wringinrejo. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian dan mendokumentasikan temuan-temuan atau data-data yang diperoleh saat melaksanakan penelitian.

3.3 Temuan Penelitian

Temuan pada penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data di lokasi penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data selesai selanjutnya peneliti mengolah data yang telah diperoleh mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Wringinrejo dengan adanya penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

3.3.1 Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Laporan Keuangan Desa Wringinrejo

Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang ada di Desa Wringinrejo dan ikut serta dalam pengelolaan keuangan Desa Wringinrejo, yaitu sebagai berikut:

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sirojudin selaku Sekretaris Desa Wringinrejo:

“Sistem pengelolaan keuangan pada Desa Wringinrejo ini sebelumnya menggunakan sistem manual, lalu diganti ke Sistem E-VB (E-Village Budgeting) yang telah dibuat oleh pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dan lingkupnya hanya se-Kabupaten Banyuwangi. Namun sekarang di himbau oleh pemerintah pusat untuk menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang lingkupnya lebih luas yaitu Nasional”

Dan hasil wawancara melalui media WhatsApp dengan Sekretaris Desa Wringinrejo Bapak Judin:

“Desa Wringinrejo sudah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mulai tahun 2021”

Dalam penerapan Aplikasi Siskeudes ini Desa Wringinrejo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zuhdi selaku Kaur Keuangan Desa Wringinrejo sebagai berikut:

“Tentu, dalam penerapan aplikasi ini kami sudah menerapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kalau yang dulu itu penerapannya harus sesuai Permendagri Nomor 113 tahun berapa ya lupa saya hehe”

Adapun beberapa hasil wawancara lainnya sebagai berikut:

Pertanyaan peneliti:

“Bagaimana peran pemerintah Desa Wringinrejo dalam menerapkan aplikasi Siskeudes ini untuk menunjang laporan keuangan Desa Wringinrejo?”

Jawaban informan 2 Sekretaris Desa Wringinrejo (Bapak Sirojudin):

“Untuk pencatatan laporan keuangan pada aplikasi Siskeudes itu merupakan tugas bendahara dan dibantu oleh sekretaris desa, jadi semisal ada kegiatan PK (Pelaksana Kegiatan) itu menyeter hasil perencanaan dan penganggaran ke bendahara untuk dicatat ke dalam aplikasi Siskeudes tersebut”

Pertanyaan peneliti:

“Untuk sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Desa Wringinrejo ini bagaimana? Terutama dalam menunjang pengoperasian aplikasi Siskeudes tersebut?”

Jawaban Informan 2 Sekretaris Desa Wringinrejo (Bapak Sirojudin):

“Untuk sarana dan prasarana di desa sudah disediakan komputer sendiri untuk digunakan mengakses aplikasi siskeudes, selain itu kami juga mempunyai laptop pribadi dan itu juga bisa digunakan untuk mengoperasikan Siskeudes. Jika memang nanti ada kekurangan sarana dan prasarananya nanti kami anggarakan untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang aplikasi itu”

Jawaban Informan 3 Kaur Keuangan Desa Wringinrejo (Bapak Zuhdi):

“Alhamdulillah untuk sarana dan prasarana di desa ini sudah memadai, ada komputer yang disediakan pemerintah yang memang sudah memenuhi untuk kriteria pengerjaan Siskeudes. Selain itu kita juga sudah ada Wifi Smart Kampung untuk menunjang pengoprasian aplikasi ini yang kebetulan aplikasi ini merupakan aplikasi online yang membutuhkan jaringan internet”

Jawaban Informan 4 Kaur Perencanaan Desa Wringinrejo (Ibu Ratna):

“Sarana dan prasarananya disini bisa dibilang lengkap mbak.. ada komputer milik desa dan ada juga laptop pribadi kami yang bisa digunakan untuk mengakses aplikasi tersebut”

Jawaban Informan 5 Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Wringinrejo (Bapak Yahya):

“Sangat menunjang sarana dan prasarananya.. komputer juga sudah disediakan khusus untuk mengakses Siskeudes”

Pertanyaan Peneliti:

“Sumber daya manusia yang tersedia di Desa Wringinrejo khususnya yang berkaitan langsung dengan aplikasi Siskeudes bagaimana?”

Jawaban Informan 2 Sekretaris Desa Wringinrejo (Bapak Sirojudin):

“Sebenarnya kalau memang dikatakan kurang ya kurang bisa.. karena dengan pengelolaan seperti itu sumber daya kita yang beranggaknya kebanyakan perangkat desa itu dulu kan lulusan

SMA/SMK. Kan kita sekarang dituntut harus bisa untuk infrastruktur, untuk kesehatan, untuk pendidikan dan bahkan kedalam segala hal kita dituntut harus bisa. Jadi kendalanya untuk SDMnya ya kita harus beradaptasi tidak bisa serta merta bisa. Mungkin kalau untuk pelayanan basicnya kita memang pelayanan, karena sekarang dengan banyaknya dana yang masuk yang tentunya juga membuat pelaksanaan itu harus menyesuaikan”

3.3.2 Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Wringinrejo

Pemerintah Desa Wringinrejo sudah melakukan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selain itu, dalam mempertanggungjawabkan hal tersebut para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa Wringinrejo juga saling berkoordinasi untuk menciptakan proses akuntabilitas desa yang baik. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan sebagai berikut:

Pertanyaan peneliti:

“Apakah pemerintah Desa Wringinrejo membuat laporan APBDes dan laporan Realisasi Anggaran Desa?”

Jawaban Informan 1 Kepala Desa Wringinrejo (Bapak Mu'adim):

“Kalau laporan APBDes dan Realisasi kami selalu buat.. setiap kegiatan selalu ada laporannya, nah nanti laporan laporan itu direkap lalu jadi laporan akhir”

Jawaban Informan 2 Sekretaris Desa Wringinrejo (Bapak Sirojudin):

“Kami sudah membuat laporan Realisasi setiap ada kegiatan pembangunan ataupun kegiatan lainnya kami selalu membuat laporan Realisasi di akhir kegiatan, karena laporan itu nantinya akan dicek oleh inspektorat yang datang ke Desa. Begitupun dengan laporan APBDes kami juga selalu buat di aplikasi Siskeudes karena itu nantinya akan di cek bersama dengan laporan Realisasi apakah benar benar terealisasi atau tidak”

Jawaban Informan 3 Kaur Keuangan Desa Wringinrejo (Bapak Zuhdi):

“Untuk laporan Realisasi kami membuatnya.. seperti contohnya melalui banner-banner yang kami pasang di titik-titik tertentu supaya masyarakat juga bisa melihat perkembangan yang telah terjadi. Selain di banner-banner itu kami juga membuat laporan Realisasi dan Laporan APBDes di aplikasi Siskeudes yang lebih rinci dan jelas”

Jawaban Informan 4 Kaur Perencanaan Desa Wringinrejo (Ibu Ratna):

“Laporan APBDes dan Realisasi ya mbak... kami selalu membuat laporan itu, bukan hanya itu saja kami juga membuat laporan perencanaan dan penganggaran saat akan mengadakan kegiatan”

Pertanyaan peneliti:

“Bagaimana alur pengelolaan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) pada Desa Wringinrejo?”

Jawaban Informan 2 Sekretaris Desa Wringinrejo (Bapak Sirojudin):

“Untuk pertanggungjawaban kita juga sudah disesuaikan dengan aturan, hal ini terbukti dengan setiap tahun itu ada inspektorat yang datang ke desa untuk mengecek laporan pertanggungjawaban kita. Kalaupun ada ketidaksempurnaan kita bisa dikatakan masih dalam tahap kewajaran dan bisa diperbaiki”

Jawaban Informan 3 Kaur Keuangan Desa Wringinrejo (Bapak Zuhdi):

“Untuk alokasi pembuatan LPJ/SPJ yang pertama pencairan itu dari PK (Pelaksana Kegiatan) melaporkan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan anggarannya berapa, setelah itu diberikan kepada bendahara setelah itu bendahara membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk pencairan di Bank yang dituju, kalau kita masing-masing desa itu di Bank Jatim. Setelah dana cair lalu ditanda tangani oleh keseluruhan dan itu bisa diambil di Bank

Jatim, setelah itu uang tersebut diserahkan kembali kepada PK untuk melaksanakan kegiatan dengan anggaran tersebut. Setelah selesai jarak satu minggu PK wajib menyelesaikan laporan pertanggungjawaban itu dengan berkas-berkas yang diperlukan, suatu contoh apabila pembangunan berarti dia harus ada nota-nota bangunan, foto bangunan mulai 0% sampai 100%. Sehingga itu menjadi lampiran dari SPJ tersebut, setelah itu dari PK setelah SPJ selesai diberikan kepada bendahara untuk pengecekan apakah SPJ itu sudah selesai dan sesuai apa belum. Apabila sudah dianggap selesai oleh bendahara maka SPJ itu disimpan oleh bendahara untuk nanti apabila ada pemeriksaan baik dari Tim Inspektorat maupun tim lainnya yang memiliki status berhak untuk mengecek atau melihat SPJ tersebut”

Pertanyaan Peneliti:

“Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini apakah pelaksanaan kewajiban pemerintah Desa Wringinrejo dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa berjalan dengan lancar?”

Jawaban Informan 2 Sekretaris Desa Wringinrejo (Bapak Sirojudin):

“Untuk pelaksanaan saya kira sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita modifikasi sesuai dengan keadaan dan kondisi desa ini”

Jawaban Informan 3 Kaur Keuangan Desa Wringinrejo (Bapak Zuhdi):

“Berjalan dengan lancar, tetapi yang jelas berjalan dengan lancarnya untuk pelaporan itu tergantung dari sistem di desa juga, karena untuk aplikasi Siskeudes ini hanya untuk mempermudah bukan menyelesaikan, tetapi penyelesaiannya itu tetap tim harus kompak antara PK dan Bendahara. Karena aplikasi ini hanya membantu meringankan dalam kita melaksanakan setiap kegiatan khususnya di perbendaharaan”

3.3.3 Transparansi Laporan Keuangan Desa Wringinrejo

Desa Wringinrejo dalam menerapkan prinsip Transparansi dalam mengelola keuangan desa sudah dilaksanakan dengan mempublikasikan Laporan APBDes dan Laporan Realisasi melalui Website resmi Siskeudes dan juga melalui banner-banner yang di pasang di titik-titik tertentu. Dalam pemasangan banner-banner tersebut tentunya memilih letak yang strategis, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar.

Pertanyaan peneliti:

“Bagaimana peran pemerintah Desa Wringinrejo dalam menerapkan prinsip Transparansi dalam mengelola Keuangan Desa?”

Jawaban Informan 2 Sekretaris Desa Wringinrejo (Bapak Sirojudin):

“Untuk transparansi sendiri kami mempublikasikan APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran Desa kepada masyarakat melalui

banner dan juga melalui website Siskeudes”

Jawaban Informan 3 Kaur Keuangan Desa Wringinrejo (Bapak Zuhdi):

“Untuk APBDes Desa Wringinrejo kita pertahun anggaran selalu kita pampang atau kita buat banner yang disitu kita pasang di titik-titik strategis agar warga itu bisa melihat untuk anggaran APBDes kita. Jika nanti ketika warga ada yang bertanya sehingga mereka bisa melihat atau membaca dari banner-banner yang kita pasang di tiap-tiap titik strategis setiap tahunnya. Selain itu kita juga menyampaikan setiap kegiatan atau Laporan Realisasi Anggaran di Desa Wringinrejo seperti pembangunan dan pengeluaran serta pemasukan kita berapa dan digunakan untuk apa saja itu kita sampaikan lewat banner-banner itu”

3.3.4 Dampak Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Perwujudan Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Wringinrejo

Perubahan pelaporan keuangan yang awalnya menggunakan *E-Village Budgeting* lalu berubah menggunakan Siskeudes tentunya ada beberapa dampak yang dirasakan oleh pemerintah Desa Wringinrejo tentunya pada orang-orang yang terlibat dalam pelaporan keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes ini. Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada Desa Wringinrejo:

Pertanyaan peneliti:

“Apa perubahan atau dampak yang dirasakan pada Desa

Wringinrejo setelah menerapkan aplikasi Siskeudes ini?”

Jawaban informan:

Informan 1 Kepala Desa Wringinrejo (Bapak Mu'adim):

“Perubahan yang saya sendiri rasakan yaitu lebih mudah dan praktis yaa.. karena saya melihat bendahara dan yang lainnya itu lebih mudah dalam pencatatan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan menggunakan Siskeudes daripada yang sebelum-sebelumnya manual”

Informan 2 Sekretaris Desa Wringinrejo (Bapak Sirojudin):

“Kalau perubahan pastinya ada.. karena kita kan sebelum pakai Sikeudes ini kita pelaporannya manual terus ganti ke E-VB baru ganti Sikeudes. Tentunya aplikasi ini memudahkan sekali bagi kami dalam mengelola dana desa dan memudahkan kami dalam pelaporan kegiatan dan laporan laporan lainnya”

Informan 3 Kaur Keuangan Desa Wringinrejo (Bapak Zuhdi):

“Yang jelas pengerjaannya, keseluruhannya baik itu pencairan ataupun pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) atau pelaporan itu lebih dipermudah, karena yang jelas penggunaan aplikasi itu lebih efisien dalam kita mengerjakan sistem keuangan maupun penganggaran. Dengan adanya aplikasi ini tentunya

memberikan dampak yang baik bagi kita dalam mengelola keuangan desa”

Selain dampak dari penerapakan aplikasi Siskeudes ada pula kendala yang dirasakan oleh pemerintah Desa Wringinrejo yaitu sebagai berikut:

Pertanyaan peneliti:

“Selama penerapan aplikasi Siskeudes ini, adakah kendala yang dirasakan oleh pemerintah Desa Wringinrejo sendiri?”

Jawaban informan 2 Sekretaris Desa Wringinrejo (Bapak Sirojudin):

“Kendalanya dibanding dengan dulu pas pakai E-VB itu kita untuk tingkat koreksi kesalahannya itu kecil dibanding dengan E-VB. Jadi kendalanya dari kita sendiri kadang masih bingung dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes karena kita juga masih terbilang awam menggunakan aplikasi ini”

Jawaban Informan 3 Kaur Keuangan Desa Wringinrejo (Bapak Zuhdi):

“Kendalanya yang jelas ada... karena bagaimanapun di Siskeudes itu.. itu adalah aplikasi baru untuk kita, terkadang juga kendalanya kita mungkin kadang belum paham karena setiap tahun itu ada sesuatu yang baru dari Siskeudes. Kayak di tahun 2022-2024 ini ada yang baru lagi, nah ini perlu kita apa namanya.. beradaptasi lagi setiap tahun di aplikasi tersebut. Mungkin itu yang membuat kita

agak terkendala ,sehingga kita harus adaptasi, adaptasi dan adaptasi lagi. Kita masih harus belajar terus”

Pertanyaan Peneliti:

“Bagaimana Solusi yang dilakukan pemerintah Desa Wringinrejo dalam menghadapi kendala tersebut?”

Jawaban Informan 2 Sekretaris Desa Wringinrejo (Bapak Sirojudin):

“Ya kita harus lebih hati-hati.. karena sistem adakalanya tidak seakurat yang kemarin.. jadi kita seringkali mengecek kembali setelah pelaksanaan .. takutnya ada apa-apa yang tidak pas jadi kita lebih hati-hati terkait dengan pengelolaan di sistem ini”

Jawaban Informan 3 Kaur Keuangan Desa Wringinrejo (Bapak Zuhdi):

“Kalau menangani masalah itu yang jelas kalau saya sendiri bisa bertanya dengan teman, bisa melihat panduan, bisa melihat di internet yang jelas yang penting itu kita punya rasa ingin tahu dan ingin bisa. Itu saja kalau menurut saya... kalau kita sudah merasa ingin bisa dan ingin tahu yang jelas kita akan berusaha mencari tahu, entah itu bertanya kepada teman, entah kita browsing ataupun kita lihat youtube yang penting kita berusaha. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya menggunakan aplikasi ini bisa dikatakan berhasil.. artinya sesuatu yang baru itu terselesaikan dengan rasa ingin tahu kita dan berusaha semaksimal mungkin”

Pertanyaan Peneliti:

“Keberhasilan sasaran penerapan aplikasi Siskeudes ini bagaimana?”

Jawaban Informan 2 Sekretaris Desa Wringinrejo (Bapak Sirojudin):

*“Untuk keberhasilan sejauh ini saya rasa sudah cukup baik, karena kita juga ada panduan-panduan, juga ada pendamping-
pendampingan sehingga jika ada kendala bisa teratasi”*

Pertanyaan Peneliti:

“Bagaimana kepuasan dari penerapan aplikasi Siskeudes ini?”

Jawaban Informan 3 Kaur Keuangan Desa Wringinrejo (Bapak Zuhdi):

“Kalau di skala mungkin 7-8 dari 10, lumayan puas karena mempermudah kita juga dalam mengelola keuangan desa”

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Laporan Keuangan Desa Wringinrejo

Keberhasilan sasaran penerapan Aplikasi Siskeudes sejauh ini Desa Wringinrejo bisa dikatakan cukup baik, hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Kaur Keuangan Desa Wringinrejo bahwasannya dalam penerapan aplikasi ini Pemerintah Desa Wringinrejo sudah menerapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan didukung oleh pernyataan dari Sekretaris Desa bahwasannya dalam penerapan aplikasi ini ada pendampingan-pendampingan dari pusat dalam penggunaan aplikasi, sehingga penerapan ini bisa berjalan dengan lancar dan jika ada kendala akan lebih mudah teratasi. Penerapan aplikasi ini memudahkan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dan menunjang perwujudan akuntabilitas serta transparansi laporan keuangan Desa Wringinrejo, sehingga masyarakat bisa lebih percaya kepada pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan, memberikan pelayanan publik dan mengembangkan desa secara berkelanjutan.

Penerapan Aplikasi Siskeudes pada Desa Wringinrejo sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan panduan penggunaan aplikasi yang telah disediakan oleh Kemendagri. Hal tersebut berdasarkan temuan-temuan atau data yang diperoleh peneliti bahwasannya dalam penerapan Aplikasi Siskeudes pemerintah Desa Wringinrejo sudah

melakukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban menggunakan aplikasi tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan ini merupakan proses penyusunan data umum Desa Wringinrejo, penyusunan perencanaan jangka menengah (RPJMDes) dan perencanaan tahunan (RKPDes). Setelah melakukan penyusunan data umum, RPJMDes dan RKPDes selanjutnya data tersebut diinput ke dalam menu perencanaan pada Aplikasi Siskeudes. Dalam penginputan data-data tersebut pemerintah Desa Wringinrejo melakukan penginputan secara berurut sesuai menu yang tersedia dalam aplikasi supaya lebih mudah dan meminimalisir kesalahan penginputan data.

2. Penganggaran

Tahap selanjutnya yaitu Pemerintah Desa Wringinrejo melakukan penganggaran rencana-rencana yang tertera di dalam RPJMDes dan RKPDes dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wringinrejo. Setelah itu hasil penganggaran diinput ke dalam menu penganggaran pada Aplikasi Siskeudes.

3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan ini adalah proses pencatatan seluruh transaksi keuangan oleh Kaur Keuangan Desa Wringinrejo yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Fungsi penatausahaan keuangan adalah untuk pengendalian atas pelaksanaan APBDes Wringinrejo. Selain pencatatan

transaksi, kaur keuangan bisa membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Denitif yang berisi kegiatan belanja yang akan perlu dilakukan pencairan dananya sesuai dengan sumber dana dan bidang kegiatannya. Setelah pembuatan SPP denitif selesai, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa Wringinrejo bisa menggunakan dokumen-dokumen atau SPP tersebut untuk melakukan pencairan dana.

4. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban ini Kaur Keuangan Desa Wringinrejo bisa melihat maupun mencetak laporan-laporan yang telah di susun mulai awal sampai akhir Laporan Realisasi Anggaran Desa (LRA), Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan, triwulan dan semesteran), Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan laporan-laporan lainnya.

Selama penerapan Aplikasi Siskeudes ada beberapa kendala yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Wringinrejo. Kendala tersebut lebih mengacu pada pemahaman perangkat desa tentang penggunaan Aplikasi Siskeudes. Karena aplikasi tersebut bisa dikatakan baru untuk Desa Wringinrejo dan setiap tahun Aplikasi Siskeudes ada pembaharuan yang baru jadi perlu adaptasi dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam lagi terkait penggunaan aplikasi tersebut. Dengan adanya kendala tersebut tentunya tidak membuat pemerintah desa menyerah begitu saja. Dalam menanggulangi permasalahan tersebut solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wringinrejo yaitu ada beberapa cara supaya dalam penggunaan aplikasi tersebut tetap berjalan

dengan lancar. Cara yang dilakukan yaitu desa yaitu dengan cara bertanya ke pihak yang lebih paham tentang penggunaan Aplikasi Siskeudes, cara lain yang digunakan adalah dengan cara melihat panduan dan menonton tutorial di media online. Sehingga kendala tersebut bisa segera diatasi dan tidak menghambat penggunaan aplikasi tersebut. Berikut adalah tabel perbandingan indikator implementasi dengan hasil wawancara:

Tabel 4.1
Perbandingan Indikator Implementasi Berdasarkan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1.	Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri	Pengelolaan keuangan sudah menggunakan sistem dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Siskeudes sejak tahun 2021	S
2.	Pengelolaan keuangan desa meliputi: a. Perencanaan b. Penatausahaan c. Pelaporan d. Pertanggungjawaban	Pengelolaan menggunakan Aplikasi Siskeudes sudah meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban	S
3.	Kaur sebagaimana dimaksud sebagai pelaksana kegiatan anggaran: a. Kaur tata usaha dan umum b. Kaur perencanaan	Membuat perencanaan penganggaran fisik	S
4.	Kaur keuangan melaksanakan tugas kebhendahaan: a. Menyusun RAK Desa	Kaur keuangan melakukan pencatatan anggaran, menerima,	S

	b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes	menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran desa	
--	---	--	--

4.2 Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Wringinrejo

Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Wringinrejo sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Desa Wringinrejo dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya penerapan Aplikasi Siskeudes ini proses untuk menciptakan Laporan Keuangan Desa Wringinrejo yang akuntabel berjalan dengan lebih efisien. Selain itu dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel diperlukan koordinasi yang baik antara perangkat desa yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa.

4.2.1 Pelaporan Pertanggungjawaban Desa Wringinrejo

Pelaporan pada Desa Wringinrejo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Ayat 1 yang berbunyi “Kepala

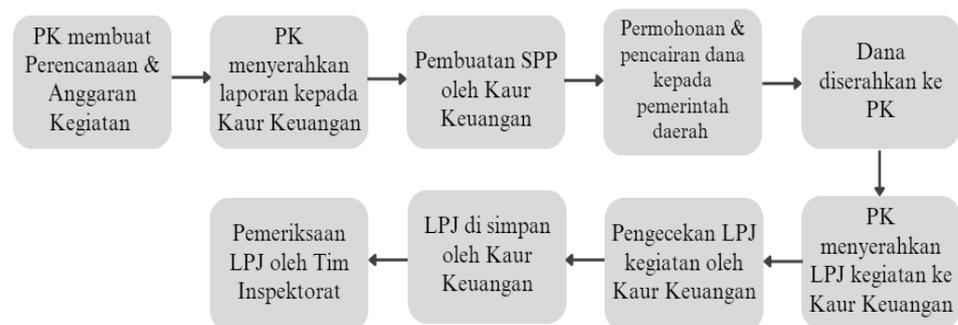
Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat” ayat 2 berbunyi “Laporan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup atas Laporan Pelaksanaan APBDes serta Laporan Realisasi Kegiatan”. Laporan semester pertama berbentuk Laporan Realisasi APBDes yang dilaporkan paling akhir bulan Juli tahun berjalan, serta laporan semester akhir tahun yang dilaporkan paling akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Peranan Pemerintah Desa Wringinrejo disini sudah melakukan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kaur Keuangan Desa Wringinrejo dan diperkuat oleh Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Wringinrejo, Kaur Perencanaan Desa Wringinrejo, Sekretaris Desa Wringinrejo dan Kepala Desa Wringinrejo bahwasannya Desa Wringinrejo sudah membuat laporan APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan Aplikasi Siskeudes. Setiap satu tahun sekali selalu memasang banner Laporan APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di tempat yang strategis dan mudah di jangkau oleh masyarakat, sehingga masyarakat tahu dana yang diperoleh oleh desa digunakan untuk apa saja dan masyarakat mengetahui perkembangan yang ada di desa untuk kedepannya. Dalam

mempertanggungjawabkan hal tersebut para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa Wringinrejo juga saling berkoordinasi untuk menciptakan proses akuntabilitas desa yang baik.

Pelaksanaan realisasi APBDes Desa Wringinrejo seringkali mengalami perubahan. Karena saat proses pelaksanaan realisasi harus menyesuaikan dengan kondisi atau perubahan perkembangan yang ada di desa terutama pembangunan desa. Perubahan tersebut tidak semena-mena dilakukan, namun dalam pengambilan keputusan perubahan itu pemerintah Desa Wringinrejo selalu mengadakan musyawarah bersama. Sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

Berikut adalah alur pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Desa Wringinrejo:



Gambar 4.1
Alur LPJ

Keterangan:

1. PK (Pelaksana Kegiatan) membuat perencanaan dan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan

2. PK melaporkan laporan perencanaan dan anggaran kegiatan kepada kaur keuangan
3. Setelah itu kaur keuangan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
4. Permohonan kepada pemerintah daerah dan untuk pencairan di Bank yang dituju, di Desa Wringinrejo pencairan dana melalui Bank Jatim. Setelah dana cair lalu ditanda tangani oleh keseluruhan dan itu bisa diambil di Bank Jatim
5. Setelah dana cair, diserahkan kembali kepada PK untuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran tersebut
6. Selanjutnya selesai kegiatan, diberi waktu satu minggu untuk PK menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban itu dengan berkas-berkas yang diperlukan, suatu contoh apabila pembangunan berarti dia harus ada nota-nota pembelian keperluan bangunan, foto bangunan mulai 0% sampai 100% untuk dijadikan bukti
7. LPJ dari PK selesai lalu diberikan kepada kaur keuangan untuk pengecekan apakah LPJ itu sudah selesai dan sesuai apa belum
8. Apabila LPJ sudah dianggap selesai oleh bendahara maka LPJ itu disimpan oleh kaur keuangan dan memasukkan laporan tersebut ke Aplikasi Siskeudes
9. Pemeriksaan dari Tim Inspektorat yang memiliki status berhak untuk mengecek atau melihat LPJ tersebut. Inspektorat merupakan lembaga yang bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan,

pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan.

Pelaporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Wringinrejo atas APBDesa yang kemudian nantinya akan dibuat sebagai Laporan Realisasi. Laporan tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Wringinrejo dalam mengelola APBDes setiap tahunnya. Pengelolaan APBDes yang mengacu pada aturan inilah yang akan ditunjukkan kepada pihak yang telah memberikan amanah. Berikut adalah tabel perbandingan indikator pelaporan dengan hasil wawancara:

Tabel 4.2
Perbandingan Indikator Pelaporan Berdasarkan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1.	APBDes terdiri dari: a. Pendapatan desa b. Belanja desa c. Pembiayaan Desa	Membuat perencanaan penganggaran fisik	S
2.	Kaur keuangan melaksanakan tugas kebhendaharaan: c. Menyusun RAK Desa d. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan	Kaur keuangan melakukan pencatatan anggaran, menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran desa	S

	dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes		
3.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat (Tim Inspektorat)	S
4.	Laporan mencakup atas Laporan Pelaksanaan APBDes serta Laporan Realisasi Kegiatan	Membuat Laporan Pelaksanaan APBDes serta Laporan Realisasi Kegiatan	S

4.3 Transparansi Laporan Keuangan Desa Wringinrejo

Transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh publik, namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Peran pemerintah Desa Wringinrejo dalam menerapkan prinsip Transparansi pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan cara mempublikasikan pendapatan yang diterima maupun pengeluaran yang dikeluarkan berupa Laporan APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran desa.

Dalam mempublikasikan laporan tersebut pemerintah Desa Wringinrejo menggunakan banner-banner yang dipasang di titik-titik tertentu yang tentunya mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain banner, media lain yang digunakan untuk mempublikasikan laporan tersebut yaitu melalui website resmi dari Siskeudes. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kaur Keuangan Desa Wringinrejo dan di dukung Sekretaris Desa Wringinrejo bahwasannya Desa Wringinrejo sudah membuplikasikan Laporan APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran dengan cara memasang banner dan mempublikasikan ke website siskeudes.

Pengelolaan dana desa yang transparan dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan desa. Karena masyarakat merasa pihak yang diberi amanah dapat dipercaya untuk mengelola keuangan desa. Dalam pelaksanaan penerapan prinsip transparan terhadap keuangan desa, Pemerintah Desa Wringinrejo telah menerapkan hal tersebut sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang berbunyi “Kepala Desa menyampaikan informasi terkait APBDes kepada warga lewat media informasi, yakni terdapatnya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar bisa dilakukan pengaksesan secara mudah oleh warga, dan terdapat papan pengumuman informasi di tiap Dusun. Terdapatnya laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban realisasi penyelenggaraan APBDes diinformasikan terhadap warga dengan cara tertulis serta melalui media informasi yang mudah dilakukan pengaksesan oleh warga, dan laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban realisasi penyelenggaraan ADD disampaikan pada Bupati atau Walikota lewat

camat”. Berikut adalah tabel perbandingan indikator transparansi dengan hasil wawancara:

Tabel 4.3
Perbandingan Indikator Transparansi Berdasarkan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1.	Laporan Realisasi Anggaran maupun laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes diinformasikan terhadap warga dengan cara tertulis serta melalui media informasi yang mudah diakses oleh warga	Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Realisasi APBDes telah diinformasikan kepada warga	S
2.	Kegiatan pencatatan kas masuk ataupun keluar bisa diakses secara mudah oleh warga dan terdapatnya papan pengumuman terkait kegiatan yang sedang dilaksanakan	Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses dengan mudah oleh warga dengan adanya papan pengumuman/banner terkait informasi anggaran yang digunakan untuk kegiatan	S
3.	Laporan Realisasi maupun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyelenggaraan ADD disampaikan pada Bupati atau Walikota lewat camat	Menyampaikan Laporan Realisasi maupun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyelenggaraan ADD kepada Bupati atau Walikota lewat camat	S

4.4 Dampak Penerapan Siskeudes Pada Desa Wringinrejo

Penerapan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa berdampak positif bagi Pemerintahan Desa Wringinrejo dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Karena dalam pengelolaan keuangan desa maupun dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa menggunakan Aplikasi Siskeudes menjadi lebih praktis, mudah dan aman. Pihak pemerintah desa merasa pelaporan keuangan desa menjadi lebih mudah dan file atau data pelaporan yang telah disimpan dari tahun-tahun sebelumnya masih tetap ada dalam Aplikasi Siskeudes, sehingga mudah diakses kembali jika data tersebut diperlukan.

Perubahan yang dirasakan Pemerintah Desa Wringinrejo setelah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini adalah pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien. Penerapan aplikasi ini memudahkan perangkat desa dalam mengelola dana desa dan memudahkan dalam pelaporan pertanggungjawabannya. Dalam pencairan dana juga lebih mudah, karena disediakan fitur pembuatan Surat Permintaan Pembiayaan (SPP) sehingga perangkat desa tinggal mencetak dan menyetorkan SPP ke pihak pencairan dana.

Adanya penerapan Aplikasi Siskeudes ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perangkat desa dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa untuk menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kaur Keuangan Desa Wringinrejo bahwasannya pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Siskeudes ini memudahkan kaur keuangan

khususnya dalam pencatatan seluruh laporan keuangan. Karena fitur-fiturnya yang lengkap dan rinci, sehingga saat laporan keuangan telah selesai kaur keuangan bisa melihat apakah pendapatan dan pengeluaran yang telah dilakukan sudah sesuai atau belum. Dengan adanya fitur-fitur yang telah disediakan, kaur keuangan menjadi lebih cepat dalam pengerjaan pencatatan laporan keuangan karena sudah ada menu-menu tersendiri, baik dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan maupun pertanggungjawabannya sehingga tidak tercampur dan kaur keuangan sendiri tidak bingung dalam penginputan data.

Dampak penerapan Aplikasi Siskeudes ini dalam perwujudan Laporan Keuangan Desa Wringinrejo yang akuntabel dan transparan memberikan dampak baik bagi Pemerintah Desa Wringinrejo karena memudahkan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan laporan keuangan menjadi lebih aman.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan dari data dan hasil penelitian tentang penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi dapat dikatakan transparan dan akuntabel berdasarkan pernyataan-pernyataan dibawah ini:

1. Dalam penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada pengelolaan keuangan Desa Wringinrejo sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Perangkat desa yang bertugas dalam pengelolaan keuangan desa saling berkoordinasi untuk terwujudnya keuangan desa yang akuntabel dan transparan, terutama dalam pelaporan keuangan desa melalui Aplikasi Siskeudes dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa. Meskipun ada beberapa kendala ringan seperti kurangnya pemahaman penggunaan aplikasi ini, kendala tersebut masih bisa di atasi pemerintahan Desa Wringinrejo. Pihak pemerintah desa merasa pelaporan keuangan desa menjadi lebih mudah dan file atau data pelaporan yang telah disimpan dari tahun-tahun sebelumnya masih tetap ada dalam Aplikasi Siskeudes, sehingga mudah diakses kembali jika data tersebut diperlukan.

2. Penerapan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa berdampak positif bagi Pemerintahan Desa Wringinrejo dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan karena dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa menggunakan Aplikasi Siskeudes menjadi lebih praktis, mudah dan aman. Akuntabilitas dan Transparansi dalam laporan keuangan Desa Wringinrejo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dimana dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa kepala desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBDes serta Laporan Realisasi Kegiatan kepada tim inspektorat. Sedangkan transparansi Laporan Keuangan Desa Wringinrejo juga sudah dilakukan dengan memasang banner Laporan Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan pada titik-titik tertentu yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

5.2 Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah desa Wringinrejo dalam melaksanakan penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pengoperasian aplikasi ini juga sudah mengikuti panduan yang telah diberikan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan).

Penggunaan Aplikasi Siskeudes sangat diperlukan bagi perangkat desa, karena aplikasi ini mempermudah dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa. Untuk perkembangan yang lebih baik lagi dalam

penggunaan aplikasi ini diperlukan peningkatan pemahaman SDM mengenai aplikasi ini lebih dalam lagi dan selalu mengikuti peraturan baru.

Mengenai Pelaporan pada Desa Wringinrejo sudah menerapkan pelaporan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwasannya laporan itu mencakup atas Laporan Pelaksanaan APBDes serta Laporan Realisasi Kegiatan. Pemerintah Desa Wringinrejo sudah membuat Laporan Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

5.3 Saran

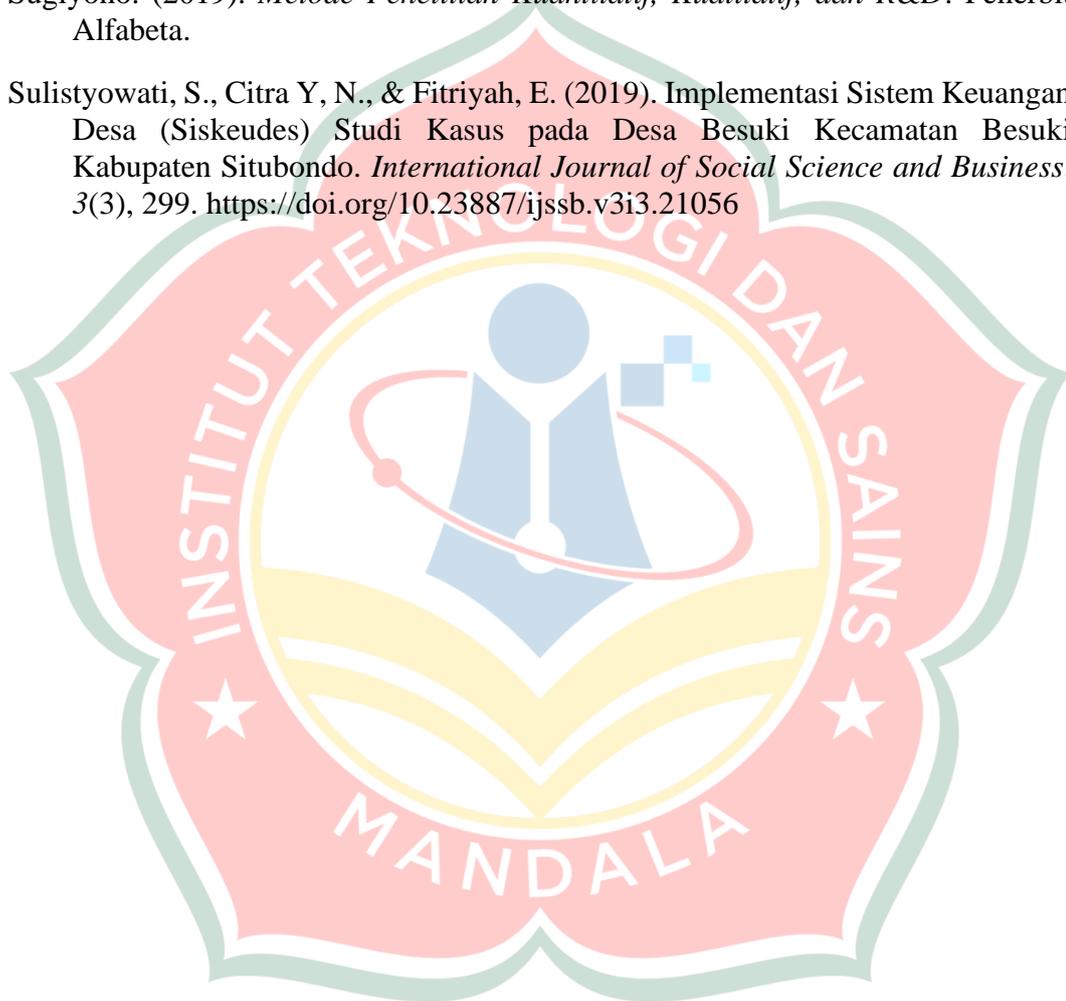
Dari kesimpulan yang telah diuraikan, untuk tercapainya penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam menunjang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa diharapkan untuk mendalami panduan yang telah disediakan dan mengadakan pendampingan tentang penggunaan Aplikasi Siskeudes demi terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang lebih efisien.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa memahami terlebih dahulu tentang pengelolaan keuangan desa beserta komponen-komponen yang berkaitan dengan kinerja keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A. N., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 335–342.
- Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan. (2017). Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). *Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP)*, 85910031(6), 2014–2015. <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>
- Creswell W. John. (2007). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuanritatif, dan Mixed*. Penerbit Pustaka Belajar.
- Endang, R. hayati. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Di Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Bartim. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 3(c), 893–903.
- Lodan, R., Dince, M. N., & Jaeng, W. M. Y. (2023). Implementasi dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa Riit. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(1), 108–120.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Ketu). Penerbit UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Surat Edaran Tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa*. 201.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Rosdakarya Offset.
- Mulgan. (1997). The Process of Publik Acoountability. *Australian Journal of Public Administration* 78.
- Nafidza Nurul Hidayati. (2023). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Desa. *Journal of Engineering Research*. <https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/7461>

- Novita Anggraeni, D. Y. (2022). Peran Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Akuntabilitas Dana Desa Dan Kinerja Aparatur Di Desa Tulungrejo. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(05), 643–650. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/index>
- Ritonga. I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Sulistyowati, S., Citra Y, N., & Fitriyah, E. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 299. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21056>



Lampiran 1. Transkrip Wawancara

Informan 1

Nama Informan : Mu'adim, S.H.

Jabatan : Kepala Desa Wringinrejo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Pemerintah Desa Wringinrejo sudah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa?	Iya.. sudah menerapkan
2	Apakah pemerintah Desa Wringinrejo membuat laporan APBDes dan laporan Realisasi Anggaran Desa?	Kalau laporan APBDes dan Realisasi kami selalu buat.. setiap kegiatan selalu ada laporannya, nah nanti laporan laporan itu direkap lalu jadi laporan akhir
3	Apa perubahan atau dampak yang dirasakan pada Desa Wringinrejo setelah menerapkan aplikasi Siskeudes ini?	Perubahan yang saya sendiri rasakan yaitu lebih mudah dan praktis yaa.. karena saya melihat bendahara dan yang lainnya itu lebih mudah dalam pencatatan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan menggunakan Siskeudes daripada yang sebelum-sebelumnya manual

Informan 2

Nama Informan : Muhammad Sirojudin

Jabatan : Sekretaris Desa Wringinrejo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Pemerintah Desa Wringinrejo sudah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa?	Sistem pengelolaan keuangan pada Desa Wringinrejo ini sebelumnya menggunakan sistem manual, lalu diganti ke Sistem E-VB (E-Village Budgeting) yang telah dibuat oleh pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dan lingkungannya hanya se-Kabupaten Banyuwangi. Namun sekarang di himbau oleh pemerintah pusat untuk menggunakan Sistem Keuangan Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
		(Siskeudes) yang lingkupnya lebih luas yaitu Nasional
2	Sejak kapan Pemerintahan Desa Wringinrejo menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa?	Desa Wringinrejo sudah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mulai tahun 2021
3	Bagaimana peran pemerintah Desa Wringinrejo dalam menerapkan aplikasi Siskeudes ini untuk menunjang laporan keuangan Desa Wringinrejo?	Untuk pencatatan laporan keuangan pada aplikasi Siskeudes itu merupakan tugas bendahara dan dibantu oleh sekretaris desa, jadi semisal ada kegiatan PK (Pelaksana Kegiatan) itu menyeter hasil perencanaan dan penganggaran ke bendahara untuk dicatat ke dalam aplikasi Siskeudes tersebut
4	Untuk sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Desa Wringinrejo ini bagaimana? Terutama dalam menunjang pengoprasian aplikasi Siskeudes tersebut?	Untuk sarana dan prasarana di desa sudah disediakan komputer sendiri untuk digunakan mengakses aplikasi siskeudes, selain itu kami juga mempunyai laptop pribadi dan itu juga bisa digunakan untuk mengoperasikan Siskeudes. Jika memang nanti ada kekurangan sarana dan prasarananya nanti kami anggarkan untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang aplikasi itu
5	Sumber daya manusia yang tersedia di Desa Wringinrejo khususnya yang berkaitan langsung dengan aplikasi Siskeudes bagaimana?	Sebenarnya kalau memang dikatakan kurang ya kurang bisa.. karena dengan pengelolaan seperti itu sumber daya kita yang beranggaknya kebanyakan perangkat desa itu dulu kan lulusan SMA/SMK. Kan kita sekarang dituntut harus bisa untuk infrastruktur, untuk kesehatan, untuk pendidikan dan bahkan kedalam segala hal kita dituntut harus bisa. Jadi kendalanya untuk SDMnya ya kita harus beradaptasi tidak bisa serta merta bisa. Mungkin kalau untuk pelayanan basicnya kita memang pelayanan, karena sekarang dengan banyaknya dana yang masuk yang tentunya juga

No	Pertanyaan	Jawaban
		membuat pelaksanaan itu harus menyesuaikan
6	Apakah pemerintah Desa Wringinrejo membuat laporan APBDes dan laporan Realisasi Anggaran Desa?	Kami sudah membuat laporan Realisasi setiap ada kegiatan pembangunan ataupun kegiatan lainnya kami selalu membuat laporan Realisasi di akhir kegiatan, karena laporan itu nantinya akan dicek oleh inspektorat yang datang ke Desa. Begitupun dengan laporan APBDes kami juga selalu buat di aplikasi Siskeudes karena itu nantinya akan di cek bersama dengan laporan Realisasi apakah benar benar terealisasi atau tidak
7	Bagaimana alur pengelolaan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) pada Desa Wringinrejo?	Untuk pertanggungjawaban kita juga sudah sesuai dengan aturan, hal ini terbukti dengan setiap tahun itu ada inspektorat yang datang ke desa untuk mengecek laporan pertanggungjawaban kita. Kalaupun ada ketidaksempurnaan kita bisa dikatakan masih dalam tahap kewajaran dan bisa diperbaiki
8	Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini apakah pelaksanaan kewajiban pemerintah Desa Wringinrejo dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa berjalan dengan lancar?	Untuk pelaksanaan saya kira sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita modifikasi sesuai dengan keadaan dan kondisi desa ini
9	Bagaimana peran pemerintah Desa Wringinrejo dalam menerapkan prinsip Transparansi dalam mengelola Keuangan Desa?	Untuk transparansi sendiri kami mempublikasikan APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran Desa kepada masyarakat melalui banner dan juga melalui website Siskeudes
10	Apa perubahan atau dampak yang dirasakan pada Desa Wringinrejo setelah menerapkan aplikasi Siskeudes ini?	Kalau perubahan pastinya ada.. karena kita kan sebelum pakai Sikeudes ini kita pelaporannya manual terus ganti ke E-VB baru ganti Sikeudes. Tentunya aplikasi ini memudahkan

No	Pertanyaan	Jawaban
		sekali bagi kami dalam mengelola dana desa dan memudahkan kami dalam pelaporan kegiatan dan laporan laporan lainnya
11	Selama penerapan aplikasi Siskeudes ini, adakah kendala yang dirasakan oleh pemerintah Desa Wringinrejo sendiri?	Kendalanya dibanding dengan dulu pas pakai E-VB itu kita untuk tingkat koreksi kesalahannya itu kecil dibanding dengan E-VB. Jadi kendalanya dari kita sendiri kadang masih bingung dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes karena kita juga masih terbilang awam menggunakan aplikasi ini
12	Bagaimana Solusi yang dilakukan pemerintah Desa Wringinrejo dalam menghadapi kendala tersebut?	Ya kita harus lebih hati-hati.. karena sistem adakalanya tidak seakurat yang kemarin.. jadi kita seringkali mengecek kembali setelah pelaksanaan .. takutnya ada apa-apa yang tidak pas jadi kita lebih hati-hati terkait dengan pengelolaan di sistem ini
13	Keberhasilan sasaran penerapan aplikasi Siskeudes ini bagaimana?	Untuk keberhasilan sejauh ini saya rasa sudah cukup baik, karena kita juga ada panduan-panduan, juga ada pendamping-pondampingan sehingga jika ada kendala bisa teratasi

Informan 3

Nama Informan : Muhammad Zuhdi

Jabatan : Kaur Keuangan Desa Wringinrejo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Dalam penerapan Aplikasi Siskeudes ini Desa Wringinrejo apakah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?	Tentu, dalam penerapan aplikasi ini kami sudah menerapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kalau yang dulu itu penerapannya harus sesuai Permendagri Nomor 113 tahun berapa ya lupa saya hehe”

No	Pertanyaan	Jawaban
2	<p>Untuk sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Desa Wringinrejo ini bagaimana? Terutama dalam menunjang pengoprasian aplikasi Siskeudes tersebut?</p>	<p>Alhamdulillah untuk sarana dan prasarana di desa ini sudah memadai, ada komputer yang disediakan pemerintah yang memang sudah memenuhi untuk kriteria pengerjaan Siskeudes. Selain itu kita juga sudah ada Wifi Smart Kampung untuk menunjang pengoprasian aplikasi ini yang kebetulan aplikasi ini merupakan aplikasi online yang membutuhkan jaringan internet”</p>
3	<p>Apakah pemerintah Desa Wringinrejo membuat laporan APBDes dan laporan Realisasi Anggaran Desa?</p>	<p>Untuk laporan Realisasi kami membuatnya.. seperti contohnya melalui banner-banner yang kami pasang di titik-titik tertentu supaya masyarakat juga bisa melihat perkembangan yang telah terjadi. Selain di banner-banner itu kami juga membuat laporan Realisasi dan Laporan APBDes di aplikasi Siskeudes yang lebih rinci dan jelas</p>
4	<p>Bagaimana alur pengelolaan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) pada Desa Wringinrejo?</p>	<p>Untuk alokasi pembuatan LPJ/SPJ yang pertama pencairan itu dari PK (Pelaksana Kegiatan) melaporkan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan anggarannya berapa, setelah itu diberikan kepada bendahara setelah itu bendahara membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk pencairan di Bank yang dituju, kalau kita masing-masing desa itu di Bank Jatim. Setelah dana cair lalu ditanda tangani oleh keseluruhan dan itu bisa diambil di Bank Jatim, setelah itu uang tersebut diserahkan kembali kepada PK untuk melaksanakan kegiatan dengan anggaran tersebut. Setelah selesai jarak satu minggu PK wajib menyelesaikan laporan pertanggungjawaban itu dengan berkas-berkas yang diperlukan, suatu</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>contoh apabila pembangunan berarti dia harus ada nota-nota bangunan, foto bangunan mulai 0% sampai 100%. Sehingga itu menjadi lampiran dari SPJ tersebut, setelah itu dari PK setelah SPJ selesai diberikan kepada bendahara untuk pengecekan apakah SPJ itu sudah selesai dan sesuai apa belum. Apabila sudah dianggap selesai oleh bendahara maka SPJ itu disimpan oleh bendahara untuk nanti apabila ada pemeriksaan baik dari Tim Inspektorat maupun tim lainnya yang memiliki status berhak untuk mengecek atau melihat SPJ tersebut</p>
5	<p>Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini apakah pelaksanaan kewajiban pemerintah Desa Wringinrejo dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa berjalan dengan lancar?</p>	<p>Berjalan dengan lancar, tetapi yang jelas berjalan dengan lancarnya untuk pelaporan itu tergantung dari sistem di desa juga, karena untuk aplikasi Siskeudes ini hanya untuk mempermudah bukan menyelesaikan, tetapi penyelesaiannya itu tetap tim harus kompak antara PK dan Bendahara. Karena aplikasi ini hanya membantu meringankan dalam kita melaksanakan setiap kegiatan khususnya di perbendaharaan</p>
6	<p>Bagaimana peran pemerintah Desa Wringinrejo dalam menerapkan prinsip Transparansi dalam mengelola Keuangan Desa?</p>	<p>Untuk APBDes Desa Wringinrejo kita pertahun anggaran selalu kita pampang atau kita buat banner yang disitu kita pasang di titik-titik strategis agar warga itu bisa melihat untuk anggaran APBDes kita. Jika nanti ketika warga ada yang bertanya sehingga mereka bisa melihat atau membaca dari banner-banner yang kita pasang di tiap-tiap titik strategis setiap tahunnya. Selain itu kita juga menyampaikan setiap kegiatan atau Laporan Realisasi Anggaran di Desa Wringinrejo seperti pembangunan dan pengeluaran serta pemasukan kita berapa dan digunakan untuk apa saja</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		itu kita sampaikan lewat banner-banner itu
7	Apa perubahan atau dampak yang dirasakan pada Desa Wringinrejo setelah menerapkan aplikasi Siskeudes ini?	Yang jelas pengerjaannya, keseluruhannya baik itu pencairan ataupun pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) atau pelaporan itu lebih dipermudah, karena yang jelas penggunaan aplikasi itu lebih efisien dalam kita mengerjakan sistem keuangan maupun penganggaran. Dengan adanya aplikasi ini tentunya memberikan dampak yang baik bagi kita dalam mengelola keuangan desa
8	Selama penerapan aplikasi Siskeudes ini, adakah kendala yang dirasakan oleh pemerintah Desa Wringinrejo sendiri?	Kendalanya yang jelas ada... karena bagaimanapun di Siskeudes itu.. itu adalah aplikasi baru untuk kita, terkadang juga kendalanya kita mungkin kadang belum paham karena setiap tahun itu ada sesuatu yang baru dari Siskeudes. Kayak di tahun 2022-2024 ini ada yang baru lagi, nah ini perlu kita apa namanya.. beradaptasi lagi setiap tahun di aplikasi tersebut. Mungkin itu yang membuat kita agak terkendala ,sehingga kita harus adaptasi, adaptasi dan adaptasi lagi. Kita masih harus belajar terus
9	Bagaimana Solusi yang dilakukan pemerintah Desa Wringinrejo dalam menghadapi kendala tersebut?	Kalau menangani masalah itu yang jelas kalau saya sendiri bisa bertanya dengan teman, bisa melihat panduan, bisa melihat di internet yang jelas yang penting itu kita punya rasa ingin tahu dan ingin bisa. Itu saja kalau menurut saya... kalau kita sudah merasa ingin bisa dan ingin tahu yang jelas kita akan berusaha mencari tahu, entah itu bertanya kepada teman, entah kita browsing ataupun kita lihat youtube yang penting kita berusaha. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya menggunakan aplikasi ini bisa dikatakan berhasil.. artinya sesuatu

No	Pertanyaan	Jawaban
		yang baru itu terselesaikan dengan rasa ingin tahu kita dan berusaha semaksimal mungkin
	Bagaimana kepuasan dari penerapan aplikasi Siskeudes ini?	Kalau di skala mungkin 7-8 dari 10, lumayan puas karena mempermudah kita juga dalam mengelola keuangan desa

Informan 4

Nama Informan : Maria Ratnawati

Jabatan : Kaur Perencanaan Desa Wringinrejo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Untuk sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Desa Wringinrejo ini bagaimana? Terutama dalam menunjang pengoprasian aplikasi Siskeudes tersebut?	Sarana dan prasarananya disini bisa dibilang lengkap mbak.. ada komputer milik desa dan ada juga laptop pribadi kami yang bisa digunakan untuk mengakses aplikasi tersebut
2	Apakah pemerintah Desa Wringinrejo membuat laporan APBDes dan laporan Realisasi Anggaran Desa?	Laporan APBDes dan Realisasi ya mbak... kami selalu membuat laporan itu, bukan hanya itu saja kami juga membuat laporan perencanaan dan penganggaran saat akan mengadakan kegiatan
3	Apakah ibu juga ikut serta dalam pembuatan laporan keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes di desa ini?	Kalau laporan keuangan itu semua di serahkan ke bendahara, saya hanya membuat perencanaan sama penganggaran fisik saja mbak.. jadi untuk masalah laporan keuangan saya kurang paham, mungkin nanti bisa ditanyakan ke bendahara

Informan 5

Nama Informan : Farid Yahya

Jabatan : Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Wringinrejo

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Desa Wringinrejo sudah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Wringinrejo?	Sudah menerapkan dari tahun 2021
2	Untuk sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Desa Wringinrejo ini bagaimana? Terutama dalam menunjang pengoprasian aplikasi Siskeudes tersebut?	Sangat menunjang sarana dan prasarananya.. komputer juga sudah disediakan khusus untuk mengakses Siskeudes
3	Apakah pemerintah Desa Wringinrejo membuat laporan APBDes dan laporan Realisasi Anggaran Desa?	Kalau laporan APBDes sama laporan realisasi kami membuatnya.. yang ada di banner-banner itu APBDes sama Realisasi

Lampiran 2. Dokumentasi Bersama Informan

Wawancara Dengan Sekretaris Desa Wringinrejo



**Wawancara Dengan Kaur Keuangan
Desa Wringinrejo**



**Wawancara Dengan Kaur Perencanaan
Desa Wringinrejo**



**Wawancara Dengan Kaur Tata Usaha
dan Umum Desa Wringinrejo**



Lampiran 3. Surat Edaran Permendagri Tentang Penerapan Siskeudes



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 November 2015

Nomor : 143/8350/6PD
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Aplikasi Pengelolaan
Keuangan Desa

Yth. Kepada
1. Gubernur;
2. Bupati/Walikota.
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 900/6271/5J dan MOU-16/K/D4/2015, tanggal 6 November 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nota kesepahaman tersebut merupakan kesepakatan kerjasama antara Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Salah satu bentuk kerjasama dimaksud adalah telah terbangunnya sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang lebih lanjut disebut "SISKEUDES", yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh BPKF dengan nama "SIMDA". Sistem aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi tersebut diberikan kepada seluruh Desa secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya;
3. Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa ini diberlakukan untuk seluruh desa dengan penerapan secara bertahap mulai tahun 2016. Selanjutnya, diminta kepada Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan/ pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;
4. Untuk mempercepat penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut, diharapkan pula kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memberikan dukungan pembiayaan melalui APBD masing-masing guna melaksanakan sosialisasi ataupun bimbingan teknis bagi aparaturnya Pemerintah Desa.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



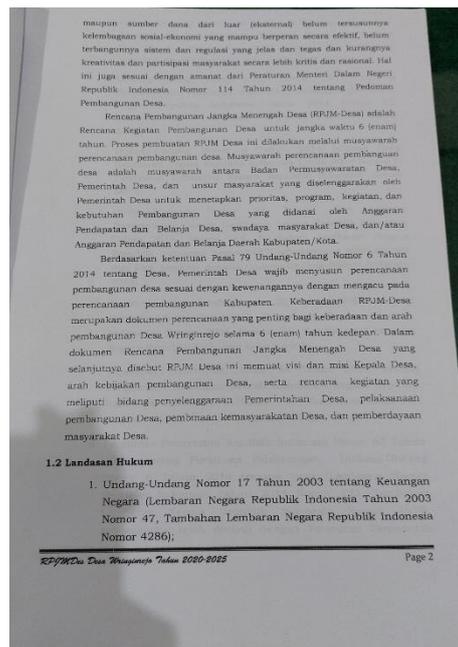
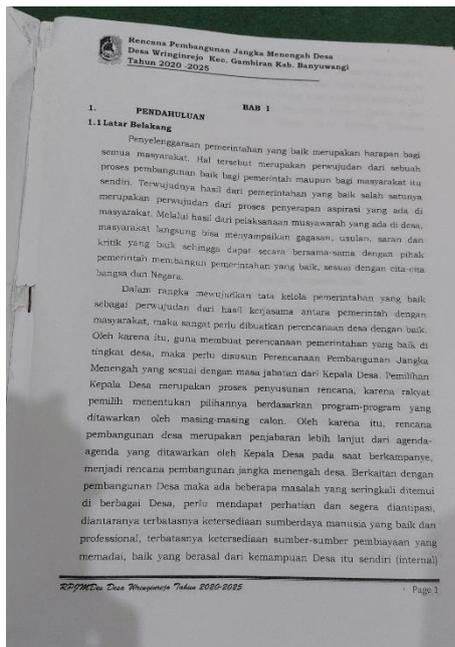
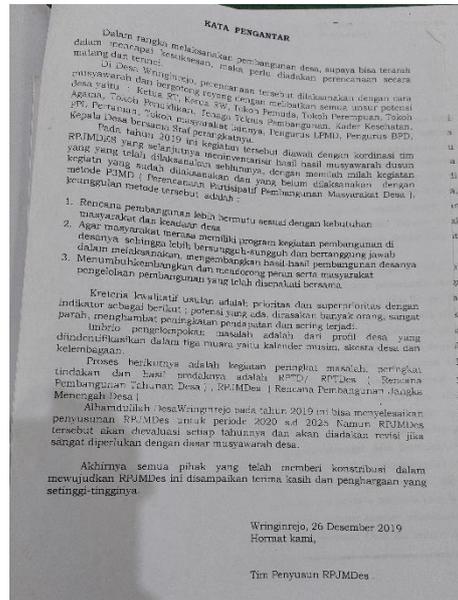
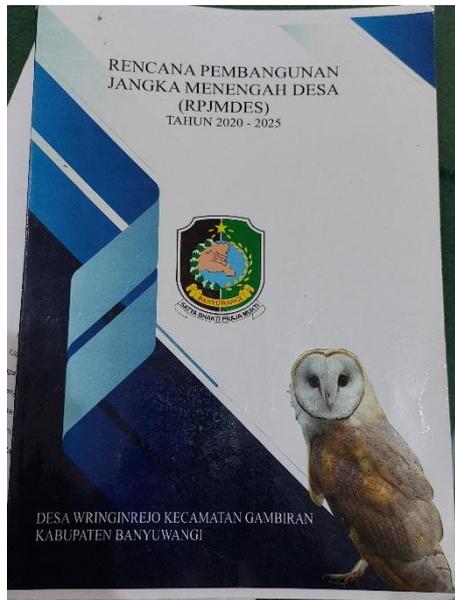
Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Lampiran 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Wringinrejo

RPJMDes



Lampiran 5. Laporan APBDes dan Laporan Realisasi Anggaran Desa
Menggunakan Aplikasi Siskeudes

Laporan APBDes Tahun 2023

BUKU PEMBANTU PENDAPATAN
PEMERINTAH DESA WRINGINREJO KECAMATAN GAMBIRAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

No.	Uraian	Jenis Pendapatan			Jumlah Pendapatan
		PAD Desa	Transfer	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6
1	0020/TBP/07.2009/2023	0,00	0,00	161.479,73	161.479,73
2	0021/TBP/07.2009/2023	0,00	0,00	120.122,44	120.122,44
3	0001/TBP/07.2009/2023	0,00	0,00	11.507.000,00	11.507.000,00
4	0002/TBP/07.2009/2023	0,00	0,00	577.300,00	577.300,00
5	0003/TBP/07.2009/2023	0,00	473.492.700,00	0,00	473.492.700,00
6	0022/TBP/07.2009/2023	0,00	0,00	130.223,43	130.223,43
7	0004/TBP/07.2009/2023	0,00	513.745.800,00	0,00	513.745.800,00
8	0005/TBP/07.2009/2023	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
9	0006/TBP/07.2009/2023	73.995.000,00	0,00	0,00	73.995.000,00
10	0007/TBP/07.2009/2023	0,00	2.228.800,00	0,00	2.228.800,00
11	0023/TBP/07.2009/2023	0,00	0,00	576.140,17	576.140,17
12	0008/TBP/07.2009/2023	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
13	0009/TBP/07.2009/2023	24.665.000,00	0,00	0,00	24.665.000,00
14	0024/TBP/07.2009/2023	0,00	0,00	378.757,64	378.757,64
15	0025/TBP/07.2009/2023	0,00	0,00	286.842,00	286.842,00
16	0026/TBP/07.2009/2023	0,00	0,00	176.488,33	176.488,33
17	0010/TBP/07.2009/2023	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
18	0011/TBP/07.2009/2023	50.685.000,00	0,00	0,00	50.685.000,00
19	0027/TBP/07.2009/2023	0,00	0,00	137.677,87	137.677,87
20	0012/TBP/07.2009/2023	0,00	398.713.300,00	0,00	398.713.300,00
21	0013/TBP/07.2009/2023	24.665.000,00	0,00	0,00	24.665.000,00
22	0014/TBP/07.2009/2023	49.330.000,00	0,00	0,00	49.330.000,00
23	0028/TBP/07.2009/2023	0,00	0,00	218.381,36	218.381,36
24	0029/TBP/07.2009/2023	0,00	0,00	230.744,34	230.744,34
25	0018/TBP/07.2009/2023	0,00	23.044.900,00	0,00	23.044.900,00
26	0019/TBP/07.2009/2023	24.665.000,00	0,00	0,00	24.665.000,00
27	0015/TBP/07.2009/2023	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
28	0016/TBP/07.2009/2023	49.330.000,00	0,00	0,00	49.330.000,00
29	0017/TBP/07.2009/2023	0,00	74.083.000,00	0,00	74.083.000,00
30	0034/TBP/07.2009/2023	0,00	0,00	208.550,54	208.550,54
31	0030/TBP/07.2009/2023	0,00	342.446.100,00	0,00	342.446.100,00
32	0032/TBP/07.2009/2023	24.665.000,00	0,00	0,00	24.665.000,00
33	0033/TBP/07.2009/2023	0,00	1.370.300,00	0,00	1.370.300,00
34	0035/TBP/07.2009/2023	0,00	0,00	316.577,89	316.577,89

Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

No.	Uraian	Jenis Pendapatan			Jumlah Pendapatan
		PAD Desa	Transfer	Lain-lain	
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	322.000.000,00	2.009.124.900,00	15.026.285,74	2.346.151.185,74
<p>Wringinrejo, 04 March 2024 kepala Urusan keuangan</p> <p>MUHAMMAD ZUHDI, S.Kom</p>					

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA WRINGINREJO KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		346.000.000,00	322.000.000,00	24.000.000,00
Pendapatan Transfer		2.009.124.900,00	2.009.124.900,00	0,00
Dana Desa		1.052.206.000,00	1.052.206.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		97.127.900,00	97.127.900,00	0,00
Alokasi Dana Desa		859.791.000,00	859.791.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		18.237.802,00	15.026.285,74	3.211.516,26
JUMLAH PENDAPATAN		2.373.362.702,00	2.346.151.185,74	27.211.516,26
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.377.233.800,76	1.184.853.650,00	192.380.250,76
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		576.602.950,00	571.151.350,00	5.451.600,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		218.137.944,00	194.019.000,00	24.118.944,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		201.836.950,00	195.481.600,00	6.355.350,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		205.000.000,00	191.000.000,00	14.000.000,00
JUMLAH BELANJA		2.578.811.644,76	2.336.505.500,00	242.306.144,76
SURPLUS / (DEFISIT)		(205.448.942,76)	9.645.685,74	(215.094.628,50)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		205.448.942,76	225.084.505,40	19.635.562,64
PEMBIAYAAN NETTO		205.448.942,76	225.084.505,40	(19.635.562,64)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAH		0,00	234.730.191,14	(234.730.191,14)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Wringinrejo, 04 March 2024

KEPALA DESA WRINGINREJO

M U ' A D I M, S.H

Lampiran 6. Banner Laporan APBDes dan Realisasi Anggaran Desa

APBDes



Realisasi Anggaran Desa



LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

NAMA : Arni Tia Ningrum
 NIM : 20105006
 JURUSAN : Akuntansi
 JUDUL : Implementasi sistem Keuangan Desa (siskeudes) Dalam Menunjang Perwujudan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Wringinrejo Kecamatan Gombiran

No	PENGUJI	REVISI	KETERANGAN
1.	Aqustin	<ul style="list-style-type: none"> ① Pertajam analisis/ pembahasan dgn triangulasi ② Lengkapi kapasitas informasi ③ Perbaiki kesimpulan 	<p>24/2024 16</p> <p>Dec 19 2024</p>
2.	Wanik FN	<ul style="list-style-type: none"> - latar belakang penelitian riset gap dipertegas & utopis - Tinjauan pustaka - perkuat pembahasan dg menyebutkan sumber informasi - Tabel rumus hand panti - Saran peneliti selanjutnya 	<p>11/24</p>
3	Juniorita Indah	<p>Moto, kata pengantar</p> <p>Batasan masalah</p> <p>Abs 3.2 → ganti Naratif</p> <p>Sub 2.2 → jelaskan dlm penelitian anda sendiri apa?</p> <p>Tabel 3.1 → lengkapi dg persm / keterkaitan informasi</p>	<p>Apr 2024?</p> <p>Dec revisi</p> <p>10/24</p> <p>Apr 24</p>



PRODI MANAJEMEN/ AKUNTANSI/EK.PEMBANGUNAN/D3